

**INOVASI GAGASAN PERDA KAWASAN BEBAS ROKOK (STUDI
KASUS DUKUNGAN MASYARAKAT TENTANG GAGASAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLMAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**MASNIATI
10538 2944 14**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Gunawan, NIM 10538278213** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

29 Jumadil Awal 1439 H
Makassar, -----
14 Februari 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Dr. H. Nursalam, M.Si.
2. Risfaisal, S.Pd., M.Pd.
3. Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd.
4. Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.Si.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Inovasi Gagasan Perda Kawasan Bebas Rokok (Studi Kasus Dukungan Masyarakat Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Polman).

Nama : Gunawan

NIM : 10538278213

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 14 Februari 2018

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.Si


Suardi, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP

Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin A. B., S.Pd., M.Pd., Ph.D.

NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.

NBM: 951 829

ABSTRAK

Gunawan 10538278213 “Inovasi Gagasan Perda Kawasan Bebas Rokok (studi kasus dukungan masyarakat tentang gagasan Pemerintah daerah kabupaten Polman)”. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I St. H. Fatimah Tola dan Suardi selaku pembimbing II.

Penelitian ini adalah bersifat kualitatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk inovasi gagasan perda tentang kawasan bebas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polman Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap gagasan Peraturan Daerah Kabupaten Polman Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok di Kabupaten Polman.

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai lembaga yang ada di masyarakat seperti lembaga pemuda penggerak generasi namun di fokuskan dalam lingkungan dinas sosial. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.

Kata Kunci: Dukungan Masyarakat Terhadap Perda.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu ' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil ' alamin, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayahNya karena berkat izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar dan sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, Ibunda Harmiah Mappatunru dan Ayahanda (alm.A. Usman Manurung, karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis sebagai anaknya serta kepada kedua saudara saya Erni, S.Pd., M.Pd. dan Gasali, S.Pd., M.Pd yang tak berbeda perannya dengan orang tua saya. Tak lupa pula kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moriil dan materil, dorongan, doa dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.e.,MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd. Sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.SI, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi, Dr. Muhammad Akhir, M.Pd. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas hingga penulis dapat menikmati dan memperoleh pengetahuan dengan nyaman dan tidak ada paksaan dalam memperoleh pengetahuan dari semua kalangan baik dari kalangan para dosen dewan senior maupun sesama teman-teman mahasiswa.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Dra. Hj. Sitti Fatimah Tola, M.Si, pembimbing I dan Dra. Rahmia Badaruddin, M.Si, pembimbing II, Serta Dr. Muhammad Nawir, M.Pd. Selaku Penasehat Akademik dari penulis.

Ucapan sebesar-besarnya saya ucapkan pula kepada sahabat-sahabat balai sidang, Ibunda Arafah, kakanda Rusli, S.Pd., kepada Paps-Q coffee yang senantiasa memberikan bantuan saran dan masukan yang tentunya sangat berarti bagi saya. Kepada sahabat-sahabat saya A. erin syahra S.Pd., MUH. Aqil Fahrezi, Abd. Rahman, Akmal, Daud, Nirmala Akis, Karina Lestari, teman-teman BEM U sahabat Akar Sosial, Flat Eart, dan berbagai nama dan pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan terlebih spesial lagi kepada kakanda Amir, S.Pd dan senior-junior Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta terlebih lagi ucapan terima kasihku yang sebesar-besarnya saya pribadi utarakan kepada Fitri

Andina Nintia, kekasihku yang setia menemaniku dalam suka dan duka hingga saat ini.

Penulis merasa skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dalam menyempurnakan proposal ini . Karena bagi penulis, kritikan itu suatu keniscayaan dari implementasi kasih sayang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita bermohon semoga berkat rahmat serta limpahan pahala dan semoga niat baik dan suci serta usaha mendapat ridho disisinya, Amin.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kedepannya penulis bisa lebih baik lagi.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2018

DAFTAR ISI

BAB 1.

PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	11
Bagaimana Bentuk Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok?.....	
Bagaimana Bentuk Inovasi Gagasan Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Kabupaten Polman?.....	11
Seperti Apa Proses Terbentuknya Inovasi Gagasan Perda ini?.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
Untuk Mendeskripsikan Bentuk Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Rokok?.....	
Menjelaskan Bentuk Inovasi Perda?.....	
Dapat Memahami Proses Terbentuknya Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman?.....	
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Akademis	
2. Manfaat Praktis	

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Inovasi.....	13
B. Gagasan.....	29
C. Program.....	32
D. Peraturan Daerah (Perda).....	35
E. Kawasan.....	35
F. Bebas.....	35
G. Rokok.....	36
H. Kerangka Pikir.....	41

BAB III.

METODE PENELITIAN.....	43
Pendekatan Penelitian.....	43
Tipe Penelitian.....	44
Fokus Penelitian.....	44
Lokasi Penelitian.....	46
Sumber Data.....	46
Informan.....	47
Tehnik Pengumpulan Data.....	48
Tehnik Analisis Data.....	49

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	68
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	69
2. Gambaran Umur Polewali Mandar	
3. Hasil Penelitian	

BAB V

Dukunagan Masyarakat Tentang Perda.....	75
A. Bentuk Dukungan Masyarakat	
B. Pengertian Dukungan Sosial Masyarakat	
C. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial	

BAB VI

Bentuk dan Proses Inovasi.....	90
A. Level Inovasi.....	91
B. Bentuk Inovasi.....	94
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	97

BAB VII

kesimpulan dan Saran.....	106
A. Kesimpulan	
B. SSaran	
Daftar Pustaka.....	108

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pelayanan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat urgen dan sudah semestinya mengarah pada hal yang bersifat konstruktif. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pelayanan publik dibidang kesehatan saat ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena pelayanan publik bidang ini merupakan salah satu bidang pelayanan publik terbesar yang dilakukan pemerintah setelah pelayanan publik dibidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena pelayanan publik bidang kesehatan menyangkut hajat orang banyak dan berhubungan langsung dengan aspek sosial kemanusiaan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Dari Badan PBB, United Nations development Programme (UNDP) menetapkan bahwa pembangunan suatu bangsa diukur dengan tiga indikator yang terdiri dari parameter kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development index (HDI). Dalam IPM, indikator kesehatan yang diwakili umur harapan hidup

menjadi unsur penting untuk mengukur kemajuan Negara-negara didunia. Diantara elemen bangsa yang ikut menentukan IPM adalah kondisikesehatan generasi muda, khususnya para remaja.

Generasi muda yang sehat akan menghasilkan penduduk yang sehat, sehingga tingkat harapan hidup meningkat. Dengan naiknya tingkat harapan hidup, kekuatan bangsa akan meningkat. Sebaliknya, generasi muda yang sakit-sakitan akan menghasilkan penduduk yang lemah dengan tingkat harapan hidup rendah. Selain pemerintah yang diamanatkan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, semua peraturan dan segala bentuk pelayanan tidak akan berhasil tanpa ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Namun saat ini kondisimasyarakat dibidang kesehatan sangat memprihatinkan. Salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan dianggap lumrah baik dikalangan menengahatas maupun kalangan menengah kebawah adalah merokok. Padahal sudah jelas diketahui bahwa merokok dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan tidak sedikit yang berujung pada kematian. Meskipun banyak yang telah mengetahui akan bahaya mengkonsumsirokok, namun masih banyak juga yang tidak menghiraukan bahaya tersebut. Data dari Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementrian kesehatan oleh Tjadra Yoga Aditama mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi Negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak didunia yaitu 61,4 juta perokok setelah Cina dan India, sekitar 60% pria dan 4,5% wanita di Indonesia adalah perokok. Sementara itu, perokok pada anak terus meningkat menurut Komnas Perlindungan Anak terdapat 45 juta anak Indonesia menjadi perokok pasif lantaran

ada anggota keluarga mereka yang memiliki kebiasaan merokok dirumah. Dari data Kemenkes, sejak tahun 1995-2007, jumlah perokok remaja meningkat hingga 12 kali lipat. Menurut Ekowati (Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI), bahwa pada tahun 1995 jumlah perokok anak dan remaja berusia 10-14 tahun di Indonesia mencapai 71.126 orang. Kemudian meningkat 6 kali lipat menjadi 426.214 orang pada tahun 2007.

Senada dengan Kemenkes, Komisi Nasional Perlindungan Anak memaparkan bahwa perokok usia 10-14 tahun jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2005. Pada 2005 tercatat 45.000 anak perokok, dan pada 2010 meningkat jumlahnya menjadi hampir sepuluh kali lipat menjadi 426.000. Pada tahun 2013 jumlah perokok terus mengalami peningkatan menjadi 676.000 anak perokok, belum termasuk jumlah anak yang menjadi perokok pasif. Selain itu, data Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas), Survei kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi perokok usia 15 tahun keatas yaitu; 27% (Susenas 1995); 31% (SKRT 2001); 34,4% (Susenas 2004); 34,7% (Riskesdas 2007) dan 36,3% (Riskesdas 2013). Walaupun proporsi perokok wanita lebih rendah dibandingkan pria, namun terjadi juga peningkatan sebanyak 5 kali lipat dari 1,7% pada tahun 1995 menjadi 6,7% ditahun 2013. Data Global Youth Tobacco Survey 2014 (GYTS 2014) menyebutkan 20,3% anak sekolah merokok dengan preferensi 36% laki-laki dan 4,3% perempuan, 57,3% anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok dalam rumah dan 60% terpapar ditempat umum atau enam dari sepuluh anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok dalam rumah dan ditempat-tempat

umum. Data GATS 2011 juga menunjukkan prevalensi perokok di Indonesiasebesar 34,8%, dan sebanyak 67% laki-laki di Indonesia adalah perokok (angkaterbesar didunia). Hasil penelitian Badan Lithbang Kemenkes pada tahun 2010menunjukkan bahwa angka kematian akibat penyakit yang terkait dengan tembakau terjadi 190.260 orang atau sekitar 12,7% dari seluruh kematian ditahun yang sama.Salah satu juga penyebab anak muda atau remaja berpotensi meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula adalah munculnya rokokillegal, karena murahnya harga rokok yang dipasarkan. Menurut WHO, jikaperedaran rokok illegal dielimasi maka pendapatan Negara diseluruh dunia mencapai USD 30 Milyar/tahun dan sebanyak 164.000 kematian premature dapat dicegah.Sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya meminimalisir dan menanggulangi penyebab rokok terutama perokok pasif dengan mengeluarkan kebijakan dan membuat aturan. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produktembakau bagi kesehatan dan penjabarannya. Dari kementrian kesehatan jugatelah membuat Permenkes Nomor 28 tahun 2013 tentang PencantumanPeringatan Kesehatan Berbentuk Gambar dan Tulisan pada Kemasan Produk Tembakau. Permenkes nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan (Road Map)Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan. Adapun regulasi dariKementrian/Lembaga lain yang terkait dengan pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, yaitu: Peraturan Kepala Badan BOM nomor 41 tahun 2013 tentang Produk Tembakau yang Beredar, Pencatuman Peringatan

Kesehatan dalam Iklan dalam Kemasan Produk Tembakau. Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2014 tentang Perdagangan Barang kena Cukai.

Di Indonesia penerapan kawasan bebas asap rokok masih sangat jauh dari harapan. Sebagai bukti sampai bulan Februari 2015 hanya 30% (166 kabupaten/kota) yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok dari 403 kabupaten dan 98 kota di Indonesia (Kemenkes, 2015). Padahal pembentukan peraturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah melalui undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ketujuh belas pasal 115 telah 6 tahun diberlakukan, tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menggambarkan belum meratanya kesadaran Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. (<http://kompasiana.com>) Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 menyatakan bahwa pemerintah Daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa rokok (KTR). Namun hingga saat ini baru ada 22 Kabupaten/kota yang sudah mulai melaksanakan kebijakan tersebut, walaupun program ini belum seragam diseluruh Indonesia. 23 Kabupaten/ kota yang sudah menerapkan KTR adalah sebagai berikut: Jakarta, Palembang, Bogor, Bandung, Polewali Mandar (gagasan 2014 Pemda), Yogyakarta, Pontianak, Surabaya, Semarang, Sragen, Bangli, Makassar, Enrekang, Lombok Timur, Payakumbuh, Padang Panjang, Padang, Bukit Tinggi, Cirebon, Karanganyar, Pekalongan, Lampung, Denpasar. (<http://health.detik.com>). Dari 23 kabupaten diatas salah satu kabupaten yang menerapkan kawasan tanpa rokok adalah Kabupaten Polman. Meskipun sebenarnya di kabupaten Polman belum sepenuhnya menerapkan kawasan bebas

asap rokok di wilayah kota. Inovasi yang digagas oleh pemerintah Polman dalam menangani masalah pendidikan dan kemajuan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menerapkan Kawasan Bebas Asap Rokok untuk mencapai lingkungan yang sehat. Aturan ini melarang masyarakat dan bagi siapa saja yang berkunjung ke kabupaten tersebut untuk tidak mengisap, menjual, dan atau sekedar mengiklankan rokok baik dalam bentuk poster maupun bentuk lainnya di kawasan yang telah disepakati.

Latar belakang terbentuknya gagasan aturan tentang larangan ini adalah berangkat dari kekhawatiran para tokoh masyarakat dan aparatur desa dengan perilaku merokok warga yang kian meningkat, tidak hanya dilakukan bukan oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak yang masih berumur 5-7 tahunan yang mengundang perhatian masyarakat untuk kemudian mendukung inovasi gagasan daerah ini. Dikemukakan pula bahwa tujuan utama pembentukan aturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah Polman ini adalah untuk pembangunan, pada awalnya masyarakat mengkaji masalah rokok mulai dari sudut pandang pendidikan, berdasarkan pemikirannya bahwa orang yang merokok tidak akan berhasil dalam pendidikan dan orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak akan mampu membangun dan mengembangkan kabupaten Polman. Selain pendidikan juga dipandang dari segi ekonomi, mereka berfikir bahwa orang yang merokok akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli rokok sehingga biaya untuk keperluan pendidikan akan kurang dan akhirnya mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Dengan melihat masalah kesehatan, dalam hal ini mereka belum terlalu paham dampak rokok bagi kesehatan, mereka hanya

menganggap secara umum bahwa orang yang merokok akan terganggu kesehatannya dan berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya mereka lihat dari segi agama, mereka mengatakan bahwa merokok adalah haram karena menyakiti badan, serta dari sudut pandang ekonomi yang tentunya sangatlah berpengaruh seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang ini, pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Polman dalam sebuah forum internal resmi menggagas inovasi peraturan tentang kawasan bebas asap rokok ini. Dalam pengamatan sebelumnya pengamat mengkaji tentang bagaimana kemudian implementasi inovasi gagasan pemerintah daerah ini mengenai kawasan bebas asap rokok di kabupaten Polman. Karena dengan melihat masalah yang ada jika dikaitkan dengan teori yang digunakan yaitu level inovasi yang erat pula kaitannya dengan fakta dan fenomena sosial maka dapat dilihat sejauhmana kebijakan pemerintah kabupaten atau daerah ini mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama dalam pemberian layanan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam kasus sebelumnya, issue yang hampir sama tentang kawasan bebas asap rokok telah dikaji dan diteliti di sebuah kabupaten yang berbeda oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di kabupaten Enrekang desa Bone-Bone tahun 2009 yang pada intinya meneliti Perdes 01 tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok di desa Bone-Bone. Pada kasus ini peneliti tersebut fokus mengkaji bagaimana inovasi program kawasan bebas asap rokok di wilayah tersebut. Hal ini hampir senada dengan yang saya kaji dalam penelitian ini tentang inovasi gagasan Perda Kabupaten Polman tahun 2014 yang kemudian

mendapat apresiasi dan memunculkan berbagai macam respon dari elemen masyarakat, baik itu bersifat pro maupun kontra. Masyarakat kemudian mulai issue ini dalam berbagai forum resmi juga diskusi-diskusi lepas dalam lingkungan masyarakat itu sendiri namun hanya berujung pada kesimpangsiuran semata, golongan pro tetap saja pada prinsipnya begitupun juga dengan masyarakat yang sangat mendukung inovasi gagasan ini tetap pada prinsip atau pendiriannya. Beberapa masyarakat yang bekerja dalam instansi kesehatan telah mencoba mensosialisasikan inovasi ini dalam lingkungan masyarakat yang merujuk pada pentingnya hidup sehat dimulai dari meninggalkan kebiasaan buruk seperti halnya merokok. Selain itu dengan penerapan sistem ini pada perencanaan peraturan daerah selanjutnya dinilai mampu memberastasi keterpurukan ekonomi meskipun tidak begitu signifikan. Di tambahkan lagi dalam sebuah argumennya bahwa efek berkelanjutan dari sistem yang tengah digagas ini akan berpengaruh luas dalam lingkungan masyarakat Polman secara khusus dan seluruh masyarakat pada umumnya, sebab sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, jumlah perokok pada kalangan usia di bawah umur terus meningkat. Menurut pandangan masyarakat dalam hal ini mereka yang terlibat dalam instansi kesehatan masyarakat kabupaten Polewali Mandar, “salah satu penyebab meningkatnya jumlah perokok terkhusus pada kalangan usia di bawah umur adalah lingkungan yang secara tidak langsung seakan memberi ruang bagi mereka untuk ikut mengidentitaskan diri sebagai perokok serta perilaku meniru yang tidak terkontrol”. Namun yang membedakan penelitian saya dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berada pada lokasi yang berbeda adalah saya selaku peneliti

lebih terfokus kepada respon dari masyarakat dalam hal ini masyarakat kabupaten polman yang pro atas inovasi gagasan ini. Mengapa demikian? Sebab kabupaten Polman merupakan salah satu daerah dengan jumlah perokok yang cukup tinggi, sebagaimana data statistik yang telah di rilis oleh kementerian nasional menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah dengan peringkat ke 6 sebagai wilayah dengan jumlah perokok tertinggi di Indonesia, kabupaten Polman merupakan wilayah terindikasi di dalamnya, meskipun belum ada data yang benar-benar valid yang mampu menunjukkan secara statistik jumlah angka perokok di kabupaten Polman. Namun tentunya, program inovasi ini sangatlah diperlukan guna mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bagi setiap lapisan elemen masyarakat yaitu menuju masyarakat yang lebih produktif. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan kuat bagi pemerintah daerah kabupaten Polman untuk kemudian dengan serius menggagas inovasi ini yang selanjutnya akan di perdakan (Perda Kabupaten Polman tahun 2014).

Serta merujuk pada Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik

langsung maupun tidak langsung. Penetapan kawasan tanparokok ini perlu diselenggarakan di lingkungan Rumah Sakit Era Medika. RumahSakit Era Medika selain sebagai tempat kerja juga merupakan fasilitas pelayanankesehatan. Pengembangan kawasan tanpa rokok mempunyai landasan hukum yaituPeraturan Pemerintah RI Nomor 81 tahun 1999 dan Nomor 38 tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, perihal Kawasan Tanpa Rokok pasal 23, 24 dan pasal 26 tentang peran masyarakat. Landasan hukum tersebut yaitu :

- a. Pasal 23Tempat umum dan atau tempat kerja yang spesifik sebagai tempat penyelenggaraan upaya kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatananak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanparokok.
- b. Pasal 24Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harusmengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.
- c. Pasal 26Masyarakat termasuk setiap orang yag memproduksi rokok dan setiap orangyang memasukan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatanuntuk berperan seluas–luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatanyang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok pada tempat umum,tempat kerja dan angkutan umum.

Dengan adanya terobosan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polman dalam penerapan program Kawasan Bebas Asap Rokok diKabupaten Polman dengan melihat teori yang ada mengenai penerapan inovasi maka hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bagaimana proses

terjadinya inovasi serta dukungan masyarakat mengenai inovasi gagasan kawasan bebas asap rokok ini. tipe dan level inovasi dalam program Inovasi Gagasan Kawasan Bebas Asap Rokok dengan mengambil judul “Inovasi Gagasan Perda Kawasan Bebas Rokok (Studi Kasus Dukungan Masyarakat Tentang Gagasan Pemerintah Daerah Kabupaten Polman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok?
2. Bagaimana Inovasi Perda Kabupaten Polman?
3. Bagaimana Proses Terbentuknya Inovasi Gagasan Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sealur dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini ialah;

1. Untuk Mendeskripsikan Bentuk Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok?
2. Menjelaskan Bagaimana Bentuk Inovasi Gagasan Perda Tersebut?
3. Dapat Memahami Proses Terbentuknya Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis, Penelitian ini Diharapkan Berguna Sebagai Suatu Karya Ilmiah yang Dapat Menunjang Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak Lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Secara Praktis, Penelitian ini Diharapkan Sebagai Bahan Masukan dan Pertimbangan Bagi Pihak Pemerintah Kabupaten Polman Dalam Program Kawasan Bebas Asap Rokok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Inovasi

A.1 Konsep Inovasi

Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris *innovation* berarti perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. (Makmur & Rohana 2012:9) Menurut Oslo Manual (Zuhail, 2013 :58), inovasi memiliki aspek yang sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya Green, Howells & Miles (Thenint, 2010 :4) mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktek atau proses baru (barang

atau layanan) atau bisa jugadengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Thomas (1996:10) Inovasi didefinisikan sebagai peluncuran sesuatu yang baru. Tujuan diluncurkannya sesuatu yang baru kedalam suatu proses adalah untuk menimbulkan perubahan besar yang radikal. Sejalan dengan pendapat diatas Albury dan mulgan dalam Thenint (2010:4) mengatakan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. Inovasi menurut Evert M.Rogers (Suwarno,2008:9) adalah sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Inovasi sendiri secara singkat didefinisikan oleh Ellitan dan Anatan (2009:36) sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru. Sedangkan Fontana (2011:18) menjelaskan inovasi sebagai keberhasilan ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari caracara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang dipersiapkan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang/jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen. Selanjutnya Samson dalam Ellitan dan Anatan (2009:3) menerangkansalah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya perubahan lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile, sehingga sebuah organisasi harus bisa mengelola inovasi sebagai penentu

keberhasilan organisasi untuk menjadi competitive. Ada tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif yang disebutkan oleh Saleh dan Wang dalam Ellitan dan Anatan (1993:3) adalah :

1. Enterprenueral strategi yaitu berani mengambil resiko, melakukan pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen.
2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya disiplin interfunksional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional.
3. Iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas dan memberikan sistem imbalan yang efektif. Borins (2000) dalam Sangkala MA (2013:25) menyatakan bahwa dalam literature inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi ide baru, dan inovasi. Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah defenisi inovasi dimana cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut lebih kepada semata-mata perubahan. Holversen (2005) dalam Sangkala MA (2013:26) mendefenisikan inovasi dalam pengertian yang agak luas sebagai “perubahan dalam perilaku” Holversen menyatakan bahwa tidak ada satupun defenisi yang mampu memberikan pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan (dalam O’Donnell,Orla.2006). Inovasi adalah alat spesifik wiraswastawan, suatu alat untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang bagi bisnis yang berbeda atau jasa yang berbeda. Inovasi dapat ditampilkan sebagai ilmu, dapat

dipelajari dan dapat dipraktekkan. (Peter 1994:21). Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi 'kombinasi baru'. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi, pemegang saham, maupun masyarakat luas. Oleh karenanya sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru (dalam de Jong & den Hartog, 2003) sedangkan istilah 'baru' dijelaskan Adair (1996).

bukan berarti original tetapi lebih ke newness (kebaruan). Arti kebaruan ini, diperjelas oleh pendapat Schumpeter bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder dan masyarakat (dalam de Jong & Den Hartog, 2003). Ruang lingkup inovasi dalam organisasi (Axtell dkk dalam Janssen, 2003), bergerak mulai dari pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori, praktek, produk, atau skala yang lebih rendah yaitu perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja. Oleh karenanya, penelitian inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dalam 3 level yaitu inovasi level individu, kelompok, dan organisasi (Adair, 1996; de Jong & Den Hartog, 2003). Jika dilihat dari kecepatan perubahan dalam proses inovasi ada dua macam inovasi yaitu inovasi radikal dan inovasi inkremental (Scot & Bruece, 1994). Inovasi radikal dilakukan

dengan skala besar, dilakukan oleh para ahli dibidangnya dan biasanya dikelola oleh departemen penelitian dan pengembangan. Inovasi radikal ini sering kali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Sedangkan inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Yang melakukan inovasi ini adalah semua pihak yang terkait sehingga pendekatan pemberdayaan sesuai dengan model inovasi inkremental ini (Bryd & Brown, 2003; Jones, 2004). Pengertian perilaku inovatif menurut Wess & Farr (dalam De Jong & Kemp, 2003) adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal 'baru', yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai shop-floor innovation (e.g., Axtell et al., 2000 dalam De Jong & Den Hartog, 2003). Pendapat senada dikemukakan oleh Stein & Woodman (Brazeal & Herbert, 1997) mengatakan bahwa inovasi adalah implementasi yang berhasil dari ide-ide kreatif.

Bryd & Bryman (2003) mengatakan bahwa ada dua dimensi yang mendasari perilaku inovatif yaitu kreativitas dan pengambilan resiko. Demikian halnya dengan pendapat Amabile dkk (de Jong & Kamp, 2003) bahwa semua inovasi diawali dari ide yang kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek yaitu keahlian, kemampuan berfikir fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal (Bryd & Bryman, 2003). Dalam proses inovasi, individu mempunyai ide-ide baru, berdasarkan proses berfikir imajinatif dan didukung oleh motivasi internal yang tinggi.

Osborn & Brown (2005) dalam Emy (2015:80) menyatakan bahwa inovasi merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa lalu. Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari perubahan karena perubahan merepresentasikan sebuah pecahan dari konfigurasi pelayanan sebelum atau pada saat tersebut dan atau kemampuan profesionalnya. Inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru kedalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Perubahan merupakan gambaran perubahan secara bertahap dari kondisi yang ada saat ini atau merupakan gambaran keberlanjutan dari masa lalu. Pugh (2007) dalam Emy (2015:84) menilai inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi adalah partner penting dari perubahan Poole & Van de Ven (ed.) (2004). Inovasi adalah sumber dari perkembangan sosial dan ekonomi, serta merupakan produk dan fasilitator dari pertukaran ide yang merupakan darah dari pembangunan. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru, kemajuan teknologi komunikasi, organisasi dan layanan baru disektor publik dan sector non-profit.

A.2. Tujuan Inovasi

Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat dan menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut dapat dicapai melalui 1) pengenalan teknologi baru, 2) aplikasi baru dalam produk dan pelayanan, 3) penyumbangan pasar baru, 4) pengenalan bentuk baru organisasi. Inovasi

organisasi berdasarkan penelitian yang dilatarbelakangi oleh Buffa (1984). Butler (1991), Miller (1991) dalam Lengnick-Hall (1988) bahwa inovasi organisasi merupakan komponen krusial yang perlu ditingkatkan, Ashoff dan Teece dalam Lengnick-Hall inovasi komponen strategis dibanyak perusahaan untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi, dan dilatarbelakangi oleh ketergantungan badan teknologi yang berpengalaman tinggi dan perusahaan yang cepat tanggap dalam hal bentuk produk dan tata cara penyampaian produk dan Boylton dan Hofer (1983) bahwa strategi global tergantung pada kecepatan akselerasi inovasi yang diterjemahkan dalam kerjasama komersial yang menguntungkan.

A.3 Sumber Inovasi

Menurut West (2000), inovasi berasal dari kreatifitas ide-ide baru. Inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut secara actual dan praktek. Hal-hal yang dapat merangsang inovasi adalah:

1. Tantangan dalam lingkungan organisasi
 - a. Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam maupun akhir suatu layanan
Perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi.
 - b. Adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secaracermat untuk.
 - c. Adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen, yaitu suatu bentuk

Dukungan manajerial yang berupa keinginan personil untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mulai cara-cara baru yang baik.

- d. Adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi
- e. Partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi Coyne (2004) mengatakan bahwa inovasi dilakukan dengan tujuan menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi, menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan memperoleh profit dan pertumbuhan. Sumber- sumber inovasi menurut Coyne dapat diciptakan melalui:
 - a. Penciptaan iklim yang kondusif, apabila ide karyawan disambut, kontribusinya dihargai, maka hal ini akan memicu organisasi untuk kreatif.
 - b. Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang berani merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah kesalahan dari ide kreatif, hal ini akan menghilangkan kreatifitas, seperti yang dinyatakan William Mc. Knight dari 3M, “Management that’s destructive critical when mistake are made kills initiative” (manajemen merusak secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh inisiatif.
 - c. Communicated total commitment (mengkomunikasikan seluruh komitmen personil)
 - d. Set goal then stand aside (menyusun tujuan, mematuhi. Dalam pandangan Coyne, inovasi bersumber dari iklim keterbukaan baik itu

ide, kreatif, tidak menghukum suatu kesalahan dari ide kreatif, mengkomunikasikan komitmen dan penyusunan tujuan.

A.4 Jenis-Jenis Inovasi

Dalam Sektor Publik Halversen dkk (2003) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor publik:

1. Incremental innovation to radical innovation (di tandai oleh tingkat perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang sudah ada).
2. Top down innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh mereka yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarki, bermakna dari para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah).
3. Need led innovations and efficiency-led innovation (ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien). Dalam (Sangkala, 2003:31) tipe inovasi dalam sector public dapat dilihat dari table berikut:

Tipe Inovasi dalam sektor Publik

No Tipe Inovasi, Contoh:

1. Layanan baru atau perbaikan layanan perawatan kesehatan dirumah.
2. Inovasi proses Perubahan dalam membuat layanan atau produk

3. Inovasi administrasi Penggunaan instrument kebijakan baru sebagai hasil dari sebuah perubahan kebijakan
4. Inovasi sistem Sistem baru atau perubahan fundamental dari sistem yang ada dengan menetapkan organisasi baru atau pola kerjasama atau interaksi baru
5. Inovasi konseptual Perubahan didalam memandang actor seperti perubahan dicapai dengan menggunakan konsep baru, mis pengintegrasian pengelolaansumberdaya
6. Perubahan radikal yang bersifat rasional. Cara pandang atau pergeseran matrik

mental pegawai dari sebuah organisasi Diadopsi dari Halverson et al (2005) Mulgan dan Albury (2003) dalam Sangkala MA (2013:31) memperkenalkan bahwa ada 3 (tiga) tipe inovasi (inkremental, radikal, dan sistemik) bersumber dari level yang berbeda (local, lintas organisasi, dan nasional) yang dihasilkan dalam instansi pemerintahan yang memerankan tiga kebijakan yang saling terkait dan tertarik dengan inovasi:

1. Inovasi kebijakan : arah dan inisiatif kebijakan baru
2. Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk mempercepat inovasi dan penggabungan.
3. Inovasi top-down dimana perubahan spesifik didorong melalui penerapan sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta inovasi bottom-up dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan memfasilitasi pengembangan dan penggabungan (difusi) inovasi yang berasal dari

organisasi atau jaringan di dalam sistem. Rogers (2003) mendefinisikan diffusion sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu terus-menerus antar anggota sistem sosial (2003). Patut dicatat dalam literatur bahwa focus pada mekanisme dan proses dimana inovasi diterapkan dan diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau disseminasi) adalah penting sebagai focus pada aslinya dan kelahiran inovasi (Mulgan dan Albury, 2003) dalam Sangkala MA (2013:32).

Dalam kaitannya dengan manajemen sector public, inovasi berarti penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard operating system yang baru bagi sector public untuk menyelesaikan persoalan public. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi dalam governance maupun administrasi public merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah-masalah lama. Kemudian membagi jenis inovasi kepada beberapa jenis antara lain:

1. Inovasi institusional, dimana focus pada pembaharuan institusi yang sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru. Pembaharuan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelenggaraan public perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani anggaran publik.
2. Inovasi organisasional, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur atau teknik manajemen baru didalam administrasi publik. Upaya menemukan

metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan public sangat diperlukan, terutama metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.

3. Inovasi proses, dimana focus pada perbaikan kualitas cara pemberian layanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan.
4. Inovasi konseptual, dimana focus pada pengenalan bentuk pemerintahan baru (mis. Pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan dalam pemerintahan, reformasi anggaran public, jaringan horizontal).

A.5 Strategi Inovasi

Dalam Pemerintahan Inovasi dan analisa pretek yang sukses menunjukkan bahwa ada lima strategi utama didalam sector pemerintahan yaitu:

1. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. Kewenangan public sering kali mengintegrasikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya penggunaan call centre, email, kartu debit, e-government dan lain-lain.
2. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan, akan membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat

atau pelakubisnis. Desentralisasi layanan mendorong pengembangan ekonomi baru. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan.

3. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan public, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara public dan swasta. Misalnya kolaborasi dengan organisasi bisnis dalam upaya mempromosikan efisiensi dan kualitas layanan administrasi publik.
4. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintahan yang inovatif harus merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika pemerintah menyediakan forum bagi public untuk mengekspresikan pandangannya dan terlibat di dalam seluruh langkah-langkah proses, maka hasil inovasi lebih memiliki kemungkinan untuk sukses dan lebih luas jangkauannya. Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan dan opininya terhadap proposal teknis yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah inovasi perubahan.
5. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. United Nation World public Sector Report tahun 2004 mencatat penggunaan layanan berbasis internet untuk memotong red tape dengan cepat keseluruh sector public. Kontribusi internet untuk menyederhanakan dan memperbaiki cara warga Negara memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan entitas publik.

Internet dapat juga bermanfaat sebagai alat perbaikan transportasi dan integritas dalam administrasi publik.

A.6 level Inovasi

Level innovative governance dilihat dari sejauh mana pelaksanaan dari best practices menurut United Nations (dalam Sangkala, 2013:8) yang terdiri atas:

1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara actor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut:
 - a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi
 - b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun
 - c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok actor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.

- d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membawa lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
 - e. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan community empowerment) yakni:
 - 1. Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya indakan dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik;
 - 2. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
 - f. Penerimaan dan tanggung jawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.
 - g. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
 - h. Tepat bagi kondisi local dan tingkatan pembangunan yang ada.
4. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan social inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.

5. inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation with in local content dan transferability) yakni bagaimana pihak lain dapat belajar atau memperoleh keuntungan dari inisiatif serta carayang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan, keahlian dan pelajaran untuk dapat dipelajari.

A.7 Dimensi Inovasi di Sektor Publik

Dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sector public adalah terdiri dari:

1. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.
2. Inovasi delivery- termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
3. Inovasi administrative dan organisasional- termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi supplier.
4. Inovasi konseptual- dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan strategi dan rationale baru.
5. Inovasi interaksi sistem- cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi lain.

A.8 Peluang dan Hambatan Inovasi

Penggunaan peluang menunjukkan suatu keberhasilan yang tidak pernah kita bayangkan atau rencanakan sebelumnya menjadi suatu kejutan yang positif, baik dalam organisasi pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi sosial lainnya. Ada banyak peluang yang bisa kita gunakan dalam rangka pengembangan inovasi terlebih jika kita mau belajar dari kenyataan dengan membandingkan ekspektasi atau harapan. Dalam rangka mewujudkan harapan setiap orang sebagai anggota organisasi ataupun anggota masyarakat, manusia perlu memotivasi dirinya masing-masing untuk melakukan pekerjaan yang lebih serius dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin. Pada dasarnya terciptanya suatu inovasi berawal dari pencarian dan penemuan peluang yang bisa diperoleh anggota, baik dari luar organisasi maupun peluang dari dalam organisasi. Dinamika peluang berinovasi senantiasa saling memengaruhi antara kondisi yang sudah dapat diperkirakan telah direncanakan sebelumnya, dan suatu kondisi atau keadaan yang tidak pernah diperkirakan atau dipikirkan terlebih dahulu dalam kehidupan organisasi. Perubahan persepsi masyarakat, antara lain adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan struktur, terjadinya perkembangan atau perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pemicu dalam melahirkan suatu peluang apabila kita sikapi dengan baik dalam rangka menciptakan inovasi. Perkembangan kondisi sosial sangatlah berfluktuasi. Hal ini ditentukan oleh tiap-tiap individu anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang berkembang secara dinamis adalah anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menangkap peluang (opportunity). Peluang dan inovasi merupakan sesuatu yang saling memperkuat.

Peluang mampu menciptakan inovasi. Begitupun sebaliknya, hasil inovasi akan menciptakan peluang baru untuk berkarya lebih banyak. Yang dimaksud hambatan inovasi adalah suatu keadaan yang dirasakan seseorang atau beberapa orang yang dapat memengaruhi untuk tidak memfungsikan keinginan pemikiran dan kemauan manusia dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam rangka menghasilkan pengetahuan, barang dan jasa baru, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan berinovasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban dan memberikan kesempatan kepada semua pihak dalam berpartisipasi dan membukakan peluang kepada banyak pihak untuk ikut menikmati hasil-hasil inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi terhadap upaya mengurangi hambatan-hambatan manusia dalam melakukan tindakan inovasi. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan solusi tunggal dalam menyelesaikan hambatan tersebut.

Setiap hambatan bersifat multi dimensi dan tidak bersifat konseptual pemikiran semata, tetapi juga terdapat hambatan yang sifatnya teknis dalam kegiatan. Adapun beberapa hambatan sekaligus yang menjadi peluang dalam melakukan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang tidak lancar

Saluran-saluran komunikasi yang tersumbat, tidak mengalir secara utuh menyebabkan interpretasi atau penafsiran ganda. Apabila kondisi seperti ini berlangsung dalam sebuah organisasi atau masyarakat dapat dipastikan akan

menghambat perkembangan inovasi yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota organisasi atau anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, apabila saluran komunikasi mengalir dengan lancar tanpa mengalami sumbatan menjadi peluang emas bagi manusia dalam melakukan aktivitas untuk mengembangkan inovasi yang dapat melahirkan kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan sanjungan dari orang lain.

2. Anggaran yang tidak cukup

Sudah menjadi pendapat umum, bahwa keberhasilan merupakan segala kegiatan manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota organisasi pemerintahan ataupun swasta. yang menjadi keluhan adalah terbatasnya anggaran. Keberhasilan kegiatan untuk meniptakan suatu inovasi bukanlah datang dengan begitu saja, melainkan harus dikerjakan melalui proses kegiatan yang memakan waktu lama serta memerlukan keseriusan yang sungguh-sungguh dalam rangka pencapaian suatu jenis inovasi sebagaimana telah direncanakan. Kedua faktor penghambat tersebut sekaligus menjadi faktor peluang dalam rangka menciptakan inovasi setiap anggotan masyarakat pada umumnya dan anggota organisasi pada khususnya.

B. Gagasan

1. Pengertian Konsep Gagasan

Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sering kita mendengar istilah Gagasan Utama, Pengertian Gagasan Utama, Contoh Gagasan Utama, ragam sastra dan lain sebagainya. Tentu saja kesemuanya ini tidak lepas dari penjelasan

sang guru bahasa Indonesia yang lebih tahu. Akan tetapi saya pernah membaca dari blog tetangga tentang pengertian Gagasan Utama dan Gagasan Penjelas. Berikut ini pengertian gagasan utama dan penjelas. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Gagasan utama yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sementara itu gagasan utama yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utama tersebut pada seluruh kalimat dalam paragraf itu. Ciri gagasan utama, kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf hanya terfokus pada isi dari topik paragraf. Kalimat utamanya pun tersebar pun mendominasi paragraf gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Ciri Gagasan Penjelas, kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraph berisi penjelasan dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan utama. Demikian informasi mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas, semoga menambah wawasan kamu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Para ahli memiliki definisi tersendiri dalam memberi definisi untuk suatu pengertian. Untuk menjelaskan definisi tentang sebuah makna kata konsep, para

ahli juga memiliki pandangan yang berbeda. Berikut ini adalah definisi pengertian gagasan atau konsep menurut para ahli:

1. Woodruff mendefinisikan konsep sebagai adalah suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.
2. Dari wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Konsep merupakan abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Pengertian Konsep sendiri adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti.
3. Pengertian Konsep sendiri adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti.
4. Soedjadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang apad umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.

5. Bahri menjelaskan konsep adalah satuan ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.

C. Program

1. Pengertian Program

Program merupakan sistem. Sedangkan sistem adalah satu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen program yang saling kait-mengait dan bekerjasama satu dengan lainnya untuk menciptakan tujuan yang sudah ditetapkan ditetapkan dalam sistem. Dengan begitu, program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan.(Suharsimi, 2014:9) Secara umum, pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini, program merupakan bagian dari perencanaan, sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Program-program tersebut merupakan sarana pemerintah dalam meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program , berikut ini akan dikemukakan defenisi oleh beberapa ahli:

Pariata Westra dkk (1989:236) mengatakan bahwa program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Menurut sindhunata, mengatakan bahwa:Program adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya untuk member tahu bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Sondang

P.Siagian (2006:117) mengatakan bahwa Perumusan Program kerja merupakan perincian dari pada suatu rencana dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam buku Pengantar Administrasi Pembangunan (1987:19) yang mengemukakan bahwa program adalah cara untuk memilih dan menghubungkan dalam rumusan tindakan yang kita anggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) Program merupakan “A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required action and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standard an budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian (2002), program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan akan program tersebut.
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah perincian suatu rencana.

D.Peraturan Daerah (Perda)

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur

atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Polewali Mandar menjadi suatu gagasan yang kian marak diperbincangkan akhir-akhir ini, kebijakan ini muncul sebagai regulasi baru yang mengkategorikan rokok sebagai material berbahaya dan mampu mendefinisikan sanksi dan denda yang rasional bagi pelanggar, dan mampu mengawal penerapan peraturan KTR. Hal yang paling penting dalam pelaksanaan KTR ialah masyarakat paham hak hidupnya dan secara aktif melindungi diri sendiri dan lingkungannya.

Perda KTR ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD pada masyarakat dan pemerintah. Ada dua peraturan lain yang juga mendukung lahirnya perda KTR ini, yaitu : pertama, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang menjelaskan bahwa setiap tempat umum, yaitu sarana kesehatan, tempat ibadah, tempat bekerja, tempat bermain anak-anak dan angkutan umum wajib menyediakan tempat untuk merokok dengan sistem sirkulasi udara yang maksimal. Kedua, Pergub Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, belum maksimal memberikan perlindungan pada perokok pasif. Di kota Jawa tepatnya di Sleman, Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disusun sejak Mei 2012, ungkap Arif Kurniawan, Ketua Komisi D, DPRD Sleman. Raperda ini merupakan perda inisiatif dari DPRD. Artinya dewan mengajukan Raperda ini pada pemerintah (eksekutif). Peluang Raperda ini terbuka dan bisa diimplementasikan dengan baik,

kemudian yang diperlukan hanya komitmen dari eksekutif. tambah Arif. Tujuan diberlakukannya KTR untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kondusif, dan nyaman. Sehingga misi KTR telah terlihat yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Arif menjelaskan, harapan kami raperda ini segera disahkan tahun ini.

Senada dengan Kemenkes, Komisi Nasional Perlindungan Anak memaparkan bahwa perokok usia 10-14 tahun jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2005. Pada 2005 tercatat 45.000 anak perokok, dan pada 2010 meningkat jumlahnya menjadi hampir sepuluh kali lipat menjadi 426.000. Pada tahun 2013 jumlah perokok terus mengalami peningkatan menjadi 676.000 anak perokok, belum termasuk jumlah anak yang menjadi perokok pasif. Selain itu, data Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas), Survei kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi perokok usia 15 tahun keatas yaitu; 27% (Susenas 1995); 31% (SKRT 2001); 34,4% (Susenas 2004); 34,7% (Riskesdas 2007) dan 36,3% (Riskesdas 2013). Walaupun proporsi perokok wanita lebih rendah dibandingkan pria, namun terjadi juga peningkatan sebanyak 5 kali lipat dari 1,7% pada tahun 1995 menjadi 6,7% ditahun 2013. Data Global Youth Tobacco Survey 2014 (GYTS 2014) menyebutkan 20,3% anak sekolah merokok dengan preferensi 36% laki-laki dan 4,3% perempuan, 57,3% anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok dalam rumah dan 60% terpapar ditempat umum atau enam dari sepuluh anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok didalam rumah dan ditempat-tempat umum. Data GATS 2011 juga menunjukkan prevalensi perokok di Indonesiasebesar 34,8%, dan sebanyak 67% laki-laki di Indonesia adalah perokok

(angkaterbesar didunia). Hasil penelitian Badan Litbang Kemenkes pada tahun 2010 menunjukkan bahwa angka kematian akibat penyakit yang terkait dengan tembakau terjadi 190.260 orang atau sekitar 12,7% dari seluruh kematian ditahun yang sama. Salah satu juga penyebab anak muda atau remaja berpotensi meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula adalah munculnya rokok ilegal, karena murah nya harga rokok yang dipasarkan. Menurut WHO, jika peredaran rokok ilegal dieliminasi maka pendapatan Negara diseluruh dunia mencapai USD 30 Milyar/tahun dan sebanyak 164.000 kematian premature dapat dicegah. Sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya meminimalisir dan menanggulangi penyebab rokok terutama perokok pasif dengan mengeluarkan kebijakan dan membuat aturan. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan penjabarannya. Dari kementerian kesehatan juga telah membuat Permenkes Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Berbentuk Gambar dan Tulisan pada Kemasan Produk Tembakau. Permenkes nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan. Adapun regulasi dari Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, yaitu: Peraturan Kepala Badan POM nomor 41 tahun 2013 tentang Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dalam Kemasan Produk Tembakau. Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2014 tentang Perdagangan Barang kena Cukai.

Di Indonesia penerapan kawasan bebas asap rokok masih sangat jauh dari harapan. Sebagai bukti sampai bulan Februari 2015 hanya 30% (166 kabupaten/kota) yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok dari 403 kabupaten dan 98 kota di Indonesia (Kemenkes,2015). Padahal pembentukan peraturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah melalui undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ketujuh belas pasal 115 telah 6 tahun diberlakukan, tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menggambarkan belum meratanya kesadaran Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. (<http://kompasiana.com>) Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 menyatakan bahwa pemerintah Daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa rokok (KTR). Namun hingga saat ini baru ada 22 Kabupaten/kota yang sudah mulai melaksanakan kebijakan tersebut, walaupun program ini belum seragam diseluruh Indonesia. 23 Kabupaten/ kota yang sudah menerapkan KTR adalah sebagai berikut:Jakarta, Palembang, Bogor, Bandung, Polewali Mandar (gagasan 2014 Pemda), Yogyakarta, Pontianak, Surabaya, Semarang, Sragen, Bangli, Makassar, Enrekang, Lombok Timur, Payakumbuh, Padang Panjang, Padang, Bukit Tinggi,Cirebon, Karanganyar, Pekalongan, Lampung, Denpasar. (<http://health.detik.com>). Dari 23 kabupaten diatas salah satu kabupaten yang menerapkan kawasan tanpa rokok adalah Kabupaten Polman. Meskipun sebenarnya dikabupaten Polman belum sepenuhnya menerapkan kawasan bebas asap rokok di wilayah kota. Inovasi yang digagas oleh pemerintah Polman dalam menangani masalah pendidikan dan kemajuan desa demi mencapai kesejahteraan

masyarakat yaitu dengan menerapkan Kawasan Bebas Asap Rokok untuk mencapai lingkungan yang sehat. Aturan ini melarang masyarakat dan bagi siapa saja yang berkunjung ke kabupaten tersebut untuk tidak mengisap, menjual, dan atau sekedar mengiklankan rokok baik dalam bentuk poster maupun bentuk lainnya di kawasan yang telah disepakati. Latar belakang terbentuknya gagasan aturan tentang larangan ini adalah berangkat dari kekhawatiran para tokoh masyarakat dan aparat desa dengan perilaku merokok warga yang kian meningkat, tidak hanya dilakukan bukan oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak yang masih berumur 5-7 tahunan yang mengundang perhatian masyarakat untuk kemudian mendukung inovasi gagasan daerah ini. Dikemukakan pula bahwa tujuan utama pembentukan aturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah Polman ini adalah untuk pembangunan, pada awalnya masyarakat mengkaji masalah rokok mulai dari sudut pandang pendidikan, berdasarkan pemikirannya bahwa orang yang merokok tidak akan berhasil dalam pendidikan dan orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak akan mampu membangun dan mengembangkan kabupaten Polman. Selain pendidikan juga dipandang dari segi ekonomi, mereka berfikir bahwa orang yang merokok akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli rokok sehingga biaya untuk keperluan pendidikan akan kurang dan akhirnya mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Dengan melihat masalah kesehatan, dalam hal ini mereka belum terlalu paham dampak rokok bagi kesehatan, mereka hanya menganggap secara umum bahwa orang yang merokok akan terganggu kesehatannya dan berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari.

Pemberlakuan Raperda KTR ini harus diupayakan bersama, yakni harus ada komitmen antara eksekutif, legislatif dan masyarakat •, tambah Arif. KTR ini tidak akan mengganggu para perokok aktif, maupun petani tembakau. Poin dari KTR ini yaitu mengatur orang yang merokok. Jadi bukan mengekang mereka untuk tidak merokok, hal ini dilakukan untuk melindungi para perokok pasif. Hal penting mengapa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi sebuah kebijakan adalah bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kebutuhan yang kompleks menuntut masyarakat bermobilitas di banyak tempat umum. Dimana tempat umum tersebut dianggap sebagai area bebas berekspresi, salah satunya “berekspresi merokok”. Sekilas, memang tidak tampak sebagai kejahatan, layaknya pencopetan, perampokan, dan kejahatan dengan kekerasan lainnya. Namun paparan asap rokok dapat berpengaruh terhadap kejadian penyakit bahkan dapat sebagai pembunuh terhadap semua kalangan masyarakat. Banyak penyakit pernapasan atau penyakit kronis lainnya yang dapat disebabkan oleh perokok. Ironisnya, perokok pasif menanggung risiko lebih besar daripada para “tersangka”nya, yaitu perokok aktif. Oleh karena itu kebijakan kewajiban menetapkan dan menerapkan KTR sangat diperlukan sebagai agenda kebijakan. Argumen kebijakan yang lemah, banyak faktor yang menjadikan kebijakan ini menjadi kurang diperhatikan oleh para penanggung jawab tempat umum yang seharusnya ditetapkan KTR. Ada beberapa tempat umum yang sudah menetapkan KTR, namun aplikasinya tidak diterapkan. Bahkan tidak sedikit para penanggung jawab tersebut justru menjadi pioneer dalam merokok. Sehingga KTR sulit untuk dijalankan selama tidak ada reward and punishment yang jelas, baik kepada masyarakat maupun penanggung jawab tempat umum. Alangkah baiknya jika pelaksanaan KTR didahului dengan memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai bahaya merokok bagi perokok dan perokok pasif. Atau alternatif yang lebih ekstrim, yaitu pelarangan membawa rokok di tempat umum. Namun, ini akan sangat sulit dijalankan karena kurang efektif dan efisien. Kebijakan menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebenarnya merupakan kebijakan yang tepat untuk mengurangi asap rokok di tempat umum.

Namun demikian, kebijakan ini menjadi tidak efektif karena tidak ada reward and punishment yang jelas. Sehingga masyarakat merasa tidak terikat aturan merokok. Meskipun berbagai media telah digunakan, missal pamflet KTR yang ditempel diberbagai sudut tidak akan efektif jika tidak ada aturan yang “memaksa”. Tidak adanya pengawasan dan pidana yang kuat membuat masyarakat selalu mengabaikan KTR, meskipun sebenarnya perokok tahu bahaya merokok di tempat umum. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dan komitmen yang kuat dari penanggung jawab tempat-tempat umum untuk melaksanakan KTR dengan tertib. Apa akar masalahnya tepat? Perlu adanya penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok, melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok, meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok. Dengan demikian, akar masalah yang nyata adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran, kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok, terutama para perokok. Harus diberi pengertian bahwa penanggung bahaya rokok bukan hanya perokok itu sendiri, namun juga berakibat pada keluarga dan para sahabatnya yang tidak merokok. Untuk dapat mengetahui bahaya rokok bagi perokok pasif maupun aktif, kita dituntut untuk memahami bahaya rokok bagi perokok pasif dan perokok aktif. Sehingga, bahaya tersebut dapat di hindari dan dapat meminimalisir kemungkinan terjerumusnya kita kedalam candu rokok. Banyak orang-orang tidak bersalah yang menjadi korban perokok aktif hanya karena perokok-perokok aktif tersebut mencemarkan udara yang juga mereka hisap.

Walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam membatasi seseorang untuk merokok, membatasi peredaran rokok, menaikkan harga cukai, hingga menutup pabrik rokok. namun kebijakan pemerintah tersebut mendapat

pertentangan yang sangat keras dari para buruh, konsumen, dan Industri pabrik rokok. pertentangan yang berat tentu saja dari pabrik rokok, keuntungan yang bisa diperoleh langsung terhenti, alat-alat pembuat rokok pun menjadi tidak berguna. Oleh karena itu pemerintah harus mempunyai solusi untuk mengatasinya. Pertimbangan lain yang membuat pemerintah bimbang adalah, Petani tembakau Indonesia hanya mampu memasok sekitar 20% dari tembakau yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Indonesia. Artinya 80% lainnya harus impor dan berarti negara menerima tambahan devisa yg cukup besar dari rokok tersebut. Zat utama yang terkandung dalam rokok adalah Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen(zat pemicu kanker), dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat sel darah merah dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Besarnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh tembakau, maka diharapkan seluruh daerah dapat pula membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang tembakau dan produk-produknya baik di tingkat propinsi maupun kabupaten / kota. Lalu hendaknya aparat pemerintah sebagai pelaksana aturan larangan merokok ditempat umum dapat menjadi contoh dan suri teladan yang baik dalam meerapkan aturan tersebut. Data-data tersebut menunjukkan bahwa betapa besar dan berat beban yang ditimbulkan akibat rokok yang ditanggung oleh masyarakat maupun negara. Lebih dari 70.000 artikel ilmiah telah membuktikan bahaya merokok bagi kesehatan. Kebiasaan merokok telah terbukti berhubungan dengan paling sedikit 25 jenis penyakit dari berbagai organ manusia seperti kanker paru, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, katarak, gangguan kesuburan, berat bayi lahir rendah dan sebagainya. Gangguan kesehatan tersebut merupakan keadaan yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan biaya yang tidak sedikit, bahkan dapat menyebabkan kematian. WHO memprediksikan kematian di Asia akan meningkat 4 kali lipat dari 1,1 juta pada tahun 1990 menjadi 4,2 juta pada tahun 2020. Dari sudut ekonomi, dampak merokok dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) penyakit-penyakit yang timbul karena merokok akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Mengapa

demikian? Seorang eksekutif atau tenaga terampil adalah “aset” perusahaan yang umumnya diperoleh melalui suatu investasi sumber daya manusia yang cukup mahal, yaitu melalui pendidikan dan latihan serta pengalaman yang sulit dinilai harganya. Tidak jarang aset sumber daya tersebut dikembangkan selama bertahun-tahun. Kematian mendadak atau kelumpuhan yang terjadi akibat penyakit yang berkaitan dengan merokok akan memusnahkan semua investasi mahal tersebut, (b) disamping itu, penyakit akibat merokok menurunkan produktivitas tenaga kerja. Pada tingkat perusahaan ini menyebabkan penurunan pendapatan sehingga angka ketergantungan secara ekonomi pada tingkat rumah tangga bertambah besar, yang selanjutnya akan mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia pada tingkat rumah tangga, misalnya dalam hal penyediaan pangan, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak, (c) adanya penyakit akibat merokok juga menyebabkan pengeluaran untuk biaya kesehatan meningkat. Biaya tersebut merupakan pengeluaran rumah tangga, pengeluaran oleh perusahaan untuk pekerja, dan pengeluaran biaya oleh pemerintah, (d) menurunnya pendapatan keluarga dan meningkatnya pengeluaran rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah akan menyebabkan kemampuan menabung menurun pada skala rumah tangga, perusahaan dan negara. Menurunnya kemampuan menabung bisa menimbulkan dampak lebih lanjut, yaitu terhambatnya investasi yang diperlukan untuk terus menumbuhkan ekonomi secara keseluruhan. Kerugian ekonomis lainnya adalah hilangnya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya manusia yang telah dikembangkan dengan biaya investasi yang sangat besar. Betapa besar subsidi pemerintah secara nasional untuk pendidikan SD, SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi. Kematian dini sumber daya manusia akibat merokok jelas merupakan kerugian nasional, yang kalau dihitung nilai moneterinya akan menampilkan angka yang sangat besar (fantastis).

Merokok memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita gangguan kesehatan akibat seperti kanker paru-paru dan jantung koroner, serta gangguan pernafasan. Bagi anak-anak di bawah umur, terdapat resiko kematian mendadak akibat terpapar asap rokok. Setidaknya tercatat 4000 kematian perokok pasif per

tahun di Amerika Serikat. Sedangkan dari sumber lainya, yaitu dari situs www.dechacare.com Dari penelitian terhadap 1.263 pasien kanker paru-paru yang tidak pernah merokok, terlihat bahwa mereka yang menjadi perokok pasif di rumah akan meningkatkan risiko kanker paru-paru hingga 18%. Apabila hal ini terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu 30 tahun lebih, risikonya meningkat menjadi 23%. Bila menjadi perokok pasif di lingkungan kerja atau kehidupan sosial, risiko kanker paru-paru akan meningkat menjadi 16% sedang bila berlangsung lama, hingga 20 tahun lebih, akan meningkat lagi risikonya menjadi 27%. Perokok aktif mungkin menikmati sebatang rokok yang mereka hisap. Namun, tanpa di sadari mereka telah merusak diri mereka sendiri, terlebih orang di sekitar mereka yang mereka cintai berada di dekat perokok aktif itu sendiri. Asap rokok tersebut akan menjadi penyakit yang lebih berbahaya ketika di hisap oleh perokok pasif di sekitar perokok aktif tersebut. 65 juta orang indonesia adalah perokok aktif. Maka dapat di bayangkan, apabila seorang perokok aktif merokok di dekat 2 atau 3 orang yang tidak merokok, di tempat umum. 1172 orang indonesia meninggalakibat penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok atau 48 orang per jam. Maka dapat di bayangkan, ternyata perokok pasif memiliki jumlah yang lebih banyak, dan banyak penyakit berbahaya yang juga menghantuinya.

E. Kawasan

1. Pengertian Kawasan

Pengertian kawasan atau wilayah menurut para Ahli Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda

dengan wilayah yang lain. Istilah lain dari wilayah yang umum digunakan dalam memahami konsep wilayah adalah *region*. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, wilayah desa mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda dengan wilayah kota dengan melihat beberapa aspek baik fisik maupun sosial. Contoh yang lain, sebagian wilayah dari permukaan bumi dapat disebut sebagai wilayah pertanian karena setiap orang di wilayah tersebut memiliki sebidang tanah dengan luas tertentu, menanaminya dengan tanaman tertentu, dan memiliki alat-alat pertanian tertentu.

F. Bebas

1. Pengertian Bebas

Bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dsb dengan leluasa). *tiap anggota berhak mengemukakan pendapat*. lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dsb). Tidak dikenakan (pajak, hukuman, dsb). Tidak terikat atau terbatas oleh aturan dsb. Merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing). Tidak terdapat (didapati) lagi

G. Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang

berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi). Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam. Efek Bahaya Asap Rokok Bagi Kesehatan Tubuh Manusia - Akibat Sebatang Rokok Racun, Ketagihan, Candu, Buang Uang Dan Dosa

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok.

1. Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida.
2. Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengeiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet.
3. Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.
4. Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok. Rokok dengan merk terkenal biasanya dimiliki oleh perusahaan rokok asing yang berasal dari luar negeri, sehingga uang yang dibelanjakan perokok sebagian akan lari ke luar negeri yang mengurangi devisa negara. Pabrik rokok yang mempekerjakan banyak buruh tidak akan mampu meningkatkan taraf hidup pegawainya, sehingga apabila pabrik rokok ditutup para buruh dapat dipekerjakan di tempat usaha lain yang lebih kreatif dan mendatangkan devisa.

5. Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok di tempat umum agar asap rokok yang dihembuskan dapat terhirup orang lain, sehingga orang lain akan terkena penyakit kanker.
6. Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini.

Kesimpulan :

Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan bodoh yang dilakukan manusia yang mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah anda jika belum merokok, karena anda adalah orang yang smart / pandai. Ketika seseorang menawarkan rokok maka tolak dengan baik. Merasa kasihanlah pada mereka yang merokok. Jangan dengarkan mereka yang menganggap anda lebih rendah dari mereka jika tidak ikutan ngerokok. karena dalam hati dan pikiran mereka yang waras mereka ingin berhenti merokok.

Referensi :

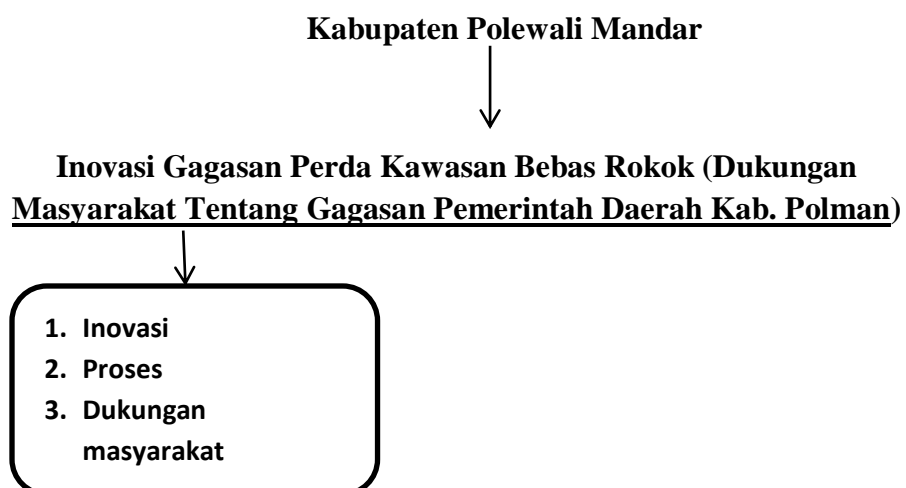
<http://organisasi.org/efek-bahaya-asap-rokok-bagi-kesehatan-tubuh-manusia-akibat-sebatang-rokok-racun-ketagihan-candu-buang-uang-dan-dosa>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>

A. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melihat gambaran mengenai Permasalahan yang dihadapi. Jenis inovasi yang digunakan menurut Halversen. (2003) yaitu: Incremental innovation to radical, Top down innovation to bottom-up innovation, Need led innovations and efficiency-led innovation. Sedangkan level inovasi peneliti menggunakan teori dari UN sesuai dengan kriteria best practices. Adapun kriteria tersebut terdiri dari enam yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, kesetaraan gender, dan inovasi dalam konteks lokal. Dengan adanya inovasi program kawasan bebas asap rokok jika dikaitkan dengan teori yang ada maka akan menciptakan daerah yang sehat bebas dari asap rokok dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kerangka pikir yang ada dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Fokus Lokasi
2. Issue atau Masalah yang Dikaji
3. Peraturan Daerah
4. Manfaat Kebijakan Peraturan Daerah



—→ **Manfaat Implementasi**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam

rangka mengetahui bagaimana inovasi program kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Polman.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa yang sebenarnya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang inovasi program Kawasan Tanpa rokok.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada dukungan masyarakat terhadap inovasi gagasan perda tentang kawasan bebas rokok, tipe inovasi kawasan bebas asap rokok dan level inovasi program kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Polman. Proses terjadinya inovasi dilihat dari bagaimana langkah proses terjadinya inovasi program kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Polman. Untuk melihat Tipe inovasi digunakan 3 (tiga) spectrum inovasi dalam sektor publik menurut Halversen (2003) dalam Sangkalan MA, yaitu:

1. Incremental innovation to radical innovation, tipe ini ditandai dengan adanya perubahan yang sangat mendasar dan secara keseluruhan dari proyek atau proses layanan yang sudah ada. Untuk menentukan tipe ini

peneliti melihat perubahan yang terjadi terhadap proyek atau proses layanan yang telah diterapkan sebelumnya dengan inovasi yang dikembangkan.

2. Top down innovation to bottom up innovation, ditandai dengan adanya perubahan yang terjadi dari segi sistem dengan artian bahwa terjadi perubahan yang mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen, middle dan lower manajemen. Dalam menentukan tipe ini peneliti melihat perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat dimulai dari pemimpin sampai pada masyarakat biasa .
3. Need led innovations and efficiency-led innovation, merupakan perubahan yang terjadi dari inovasi proses yang terjadi sebelumnya untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien. Dalam menentukan tipe ini peneliti melihat program yang diterapkan sudah lebih efisien dibandingkan dengan program sebelumnya. Sedangkan level inovasi menggunakan kriteria best practices menurut UN (dalam Sangkala 2013:8) yang terdiri atas:
 - a. Dampak (Impact), dalam level inovasi yang dimaksud dengandampak yaitu sejauhmana program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap sejumlah pihak. Untuk menilai hal tersebut peneliti berupaya membandingkan antara sebelum dan sesudah adanya program diterapkan. Oleh karena itu semakin tinggi dampak yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin inovatif program tersebut.

- b. Kemitraan (partnership), yaitu sejauhmana kerjasama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program yang dikembangkan. Untuk mencerminkan unsur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan penyelenggaraan pemerintahan. Penilaiananya diukur dari sejauhmana tingkat kemitraan yang terjadi yaitu semakin tinggi tingkat kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, maka semakin baik level inovasi program tersebut.
- c. Keberlanjutan (sustainability), dalam konteks penerapan program kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Polman yakni adanya dukungan berbagai elemen terkait. Elemen terkait yang dimaksud adalah dukungan pemerintah daerah, dukungan dari unsur masyarakat, dukungan lingkungan, dan sumberdaya manusia.
- d. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan community empowerment), yaitu kemampuan para pengambil kebijakan dalam mengarahkan dan mengawasi sumberdaya, elemen pendukung, serta instrument yang dimilikinya untuk mencapai tujuan program yang dicanamkan serta tidak terlepas dari aspek teknik yangdigunakan dalam pengorganisasian dan realisasi tindakannya. Serta sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses penerapan program kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Polman.
- e. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan social inclusion), yaitu merujuk kepada pemahaman adanya kesamaan

kedudukan dan perlakuan secara hukum yang dialami oleh masyarakat. Dalam konteks inovasi program, kesetaraan masyarakat bermakna kedudukan dan perlakuan yang diterima oleh masyarakat pelaksana program kawasan bebas asap rokok.

- f. Inovasi dalam konteks local dan dapat ditransfer (innovation with in local content dan transferability). Dalam lokal merujuk kepada aspek-aspek kebutuhan masyarakat, sumberdaya internal yang dimiliki aspek kebudayaan setempat, serta aspek program yang dikenal sebelumnya.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Polman sebagai lokasi tujuan dari penerapan inovasi gagasan tersebut.kawasan bebas asap rokok. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena daerah Polman dianggap daerah yang kompleks dan krisis kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

E. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J.Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumberdata, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporanlaporan penelitian.

F. Informan

Dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pengetahuan tentang masalah penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Kabupaten Polman
2. Masyarakat Umum
 - a. Pelajar (11 oarng)
 - b. Kepala Rumah Tangga (3)
 - c. Pemuda (20)

G. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan parainforman sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Lofland and

Lofland dalam Moleong (2001:112) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
2. Wawancara, adalah kegiatan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan peneliti dengan aparat desa di desa Bonebone sebagai lokasi penelitian.
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar.

H. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan

para informan. Hasil pengumpulan data tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian (Maleong.2001).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut gambaran mengenai Kabupaten Polman

B. Gambaran Umum Kabupaten Polman

Kabupaten Polman merupakan salah satu kabupaten yang cukup luas dan padat yang ada di provinsi Sulawesi Barat.

Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Polewali Mandar.

Kecamatan	Distribusi Persentase Penduduk (Persen)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tinambung	5.63	5.63	5.65	5.66	5.65	5.65
Balanipa	6.06	6.06	6	5.98	5.94	5.95
Limboro	4.29	4.29	4.22	4.21	4.17	4.16
Tubbi Taramanu	4.61	4.61	4.65	4.67	4.66	4.67
Alu	3.02	3.02	3.01	3.01	2.99	3
Campalagian	13.20	13.21	13.16	13.13	13.08	13.08
Luyo	6.74	6.74	6.79	6.83	6.84	6.85
Wonomulyo	11.43	11.43	11.41	11.40	11.41	11.41
Mapilli	6.87	6.87	6.78	6.75	6.75	6.75
Tapango	5.43	5.43	5.47	5.48	5.49	5.49
Matakali	5.38	5.38	5.40	5.40	5.40	5.40
Bulo	2.18	2.18	2.21	2.22	2.23	2.23
Polewali	13.85	13.84	13.94	13.97	14.03	14.06
Binuang	7.70	7.70	7.68	7.64	7.69	7.66
Anreapi	2.34	2.34	2.35	2.37	2.37	2.37
Matangnga	1.26	1.26	1.28	1.29	1.29	1.29
Kabupaten Polewali Mandar	100	100	100	100	100	100

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2010–2015

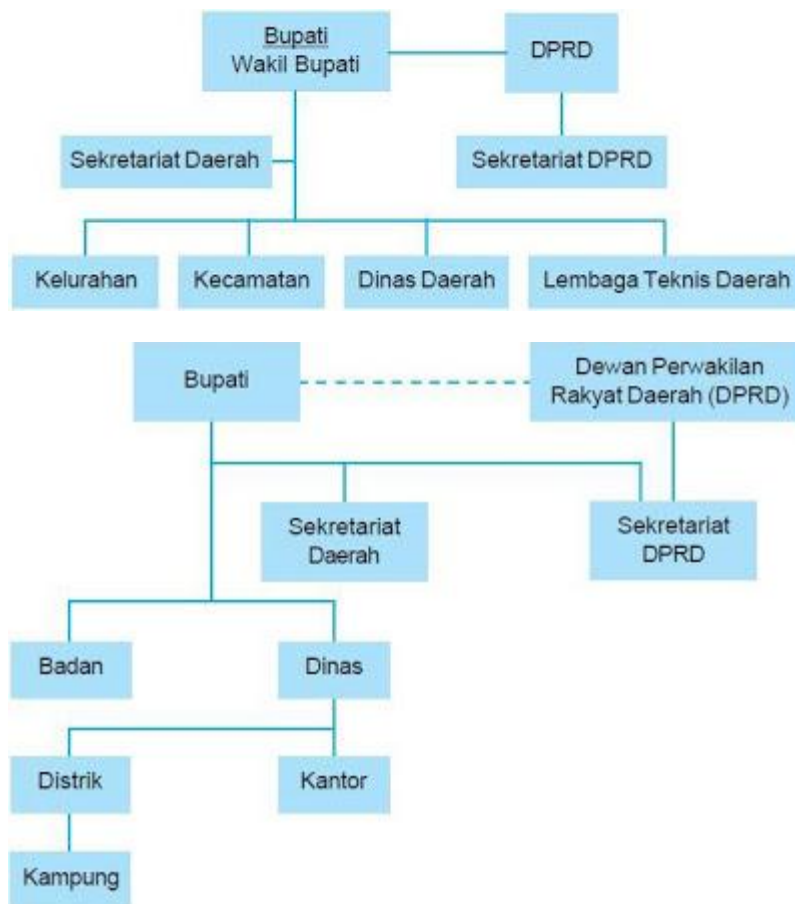
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)																	
	Laki-laki						Perempuan						Jumlah					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tinambung	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	22	22	23	23	23	23
Balanipa	62	75	00	10	25	40	69	84	15	20	34	46	31	60	15	31	59	86
Limboro	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13	24	24	24	24	24	25
Tubbi	47	62	74	75	84	02	54	70	84	89	96	11	02	33	58	65	80	13
Taramanu	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	16	17	17	17	17	17
Alu	90	00	01	11	15	25	08	19	25	23	26	34	98	20	27	34	41	60
Campalagian	0	3	8	0	6	8	1	9	4	1	0	6	1	2	2	1	6	4
Luyo	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	18	18	19	19	19	19
Wonomulyo	99	11	39	49	61	77	27	39	67	74	84	97	27	51	06	23	46	74
Mapilli	9	6	2	0	6	1	4	5	5	1	9	6	3	1	7	1	5	7
Tapang	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	11	12	12	12	12	12
Matakali	67	75	84	88	94	03	30	38	48	50	55	63	98	13	33	38	50	67
Bulo	8	2	2	3	4	6	2	4	9	5	8	6	0	6	1	8	2	2
Polewa	25	25	25	25	26	26	27	27	28	28	28	28	52	52	53	54	54	55
	03	36	82	91	18	56	26	62	10	21	44	75	30	98	92	12	62	32
	9	5	5	0	2	5	8	3	1	5	4	5	7	8	6	5	6	0
	13	13	13	13	14	14	13	13	14	14	14	14	26	27	27	28	28	28
	13	30	68	85	07	30	55	73	10	28	47	65	69	03	79	13	54	96
	3	4	7	5	3	2	9	5	8	4	6	8	2	9	5	9	9	0
	22	22	23	23	23	23	22	23	23	23	24	24	45	45	46	46	47	48
	29	58	00	17	52	86	97	27	72	80	10	36	26	85	72	97	63	22
	7	7	5	0	4	5	2	1	1	6	7	3	9	8	6	6	1	8

li	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	27	27	27	27	28	28
	30	47	54	59	78	98	91	10	22	23	41	56	22	57	76	83	19	54
Binuang	1	4	0	3	9	3	9	0	7	7	0	0	0	4	7	0	9	3
	10	10	11	11	11	11	10	10	11	11	11	11	21	21	22	22	22	23
Anreapi	76	90	24	32	49	67	72	86	17	26	40	54	49	77	42	58	90	21
	8	8	3	3	6	4	4	3	8	3	8	3	2	1	1	6	4	7
Matangnga	10	10	11	11	11	11	10	10	11	11	11	11	21	21	22	22	22	22
	61	75	02	10	26	42	69	83	12	13	26	39	31	58	14	24	53	81
	2	0	1	8	4	6	8	7	0	9	9	2	0	7	1	7	3	8
Kabupaten																		
atenu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	9	9	9	9
Polewali	31	36	53	56	64	71	32	37	53	58	65	70	63	74	06	15	30	41
Mandar	1	7	5	5	7	2	2	8	2	6	7	6	3	5	7	1	4	8
	26	27	27	28	28	29	28	28	29	29	29	30	54	55	57	57	58	59
	74	08	83	08	60	09	10	46	25	48	95	34	84	55	09	56	56	43
	1	9	6	7	7	1	2	7	9	2	4	3	3	6	5	9	1	4
	14	15	15	15	15	15	15	15	16	15	16	16	30	30	31	31	32	32
	99	18	42	50	82	98	51	71	02	99	28	38	50	90	45	50	10	36
	2	7	7	5	2	1	2	4	3	5	2	5	4	1	0	0	4	6
	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	10
	67	74	86	91	98	05	59	65	76	85	90	96	27	39	62	76	88	01
	9	0	2	4	0	0	4	4	0	4	9	4	3	4	2	8	9	4
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5
	55	59	70	73	78	81	44	47	52	56	60	62	00	07	23	30	38	44
	9	2	6	5	1	9	6	8	6	8	2	7	5	0	2	3	3	6
	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	39	40	40	41	41	42	
	3	5	9	1	3	6	3	5	9	1	3	5	6	1	9	2	7	2
	10	62	68	11	98	96	01	65	96	01	49	83	12	27	64	12	47	79
	8	0	2	2	1	3	2	2	6	0	1	0	0	2	8	2	2	3

Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati

dan perangkatnya. Perangkat daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



a. Bupati

Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik).

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

c. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

d. Polisi Pamong Praja

Tugas polisi pamong praja adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta merupakan penegak peraturan daerah.

f. Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa/kelurahan.

g. Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh dinas daerah antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dan sebagainya.

i. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

C. Hasil Penelitian

Kawasan bebas asap rokok merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dimuat dalam Peraturan Daerahkabupaten Polman provinsi Sulawesi Barat demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Merupakan sebuah inovasi karena aturan yang dikeluarkan adalah program baru yang belum ada sebelumnya dan setelah diterapkan dapat membawa dampak dan perubahan yang sangat baik terhadap masyarakat setempat sesuai dengan konsep *Best Practice*. Aturan yang dibuat bukan hanya berlaku di tempat umum namun di seluruhkawasan yang berskala luas di kabupaten Polma. Dalam aturan itu masyarakat dilarang merokok, menjual, ataupun mengiklankan produk rokok/tembakau di kabupaten Polman.

BAB V

DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA

A. Bentuk Dukungan

Dalam proses penerapan inovasi gagasan perda ini masyarakat sangat antusias dalam menyambut penerapannya, hal ini di buktikan dengan data yang saya dapatkan di lapangan dalam suatu proses wawancara dengan responden berikut bernama nirwanto:

“saya sebagai perokok sangat menyambut inovasi gagasan perda ini, bukan karena saya suka dengan sistem ini, melainkan sebagai salah satu alasan saya untuk bisa berhenti secara perlahan-lahan merokok (wawancara pada 21 oktober 2017)”

Stetmen yang senada juga di sampaikan oleh responden lain, agus;

“kalau benar inovasi ini di terapkan dengan baik kedepannya oleh pemerintah, mungkin 5 tahun kedepan saya bisa mengkredi mobil hasil dari tabungan belanja rokok saya, haha atau mungkin segera menikah dengan gadis idamanku, sejauh ini biaya rokok saya dala

sehari berkisar Rp. 40.000,. inovasi ini akan saya manfaatkan untuk berhenti merokok (wawancara pada 21 oktober 2017)”

Selain kedua responden di atas, juga ada responden dari seorang wanita, Fitri;

“saya seorang wanita yang sangat merasa terganggu dengan hadirnya para smoker apalagi pada saat mereka merokok di tempat yang tertutup atau ramai, misalnya dalam kendaraan umum, warung dsb (wawancara pada 21 oktober 2017)”

Demikianlah wawancara dari beberapa responden dari berbagai elemen masyarakat, sebagai kesimpulan dari wawancara tersebut, maka dapat saya simpulkan sebagai peneliti dalam kasus ini bahwa;

“masyarakat sangat mendukung inovasi gagasan perda tentang kawasan bebas rokok ini, dari berbagai alasan dan pernyataan yang responden kemukakan, pada intinya semua mengharapkan kenyamanan dalam lingkungan hidup mereka”

Suhariyanto Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok Penerapan kawasan tanpa rokok di Indonesia masih jauh dari harapan. Sebagai bukti sampai Februari 2015 hanya 30 % (166 kabupaten/kota) yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok, dari 403 kabupaten dan 98 kota di Indonesia (Kemenkes, 2015) Perlu usaha semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat bersama-sama melaksanakan peraturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia no.36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ketujuh belas pasal 115 telah enam tahun diberlakukan, tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Solusi yang diperlukan untuk penerapan kawasan tanpa rokok antara lain perencanaan dan implementasi kebijakan secara

desentralisasi setiap pemerintah daerah dengan advokasi ke lembaga legislatif. Kolaborasi dengan berbagai sektor terkait untuk membangun dukungan lingkungan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan sebagai upaya penegak hukum. Pemantauan dengan evaluasi yang terus menerus dengan menggandeng pihak akademik dalam perkembangan bukti ilmiah dan pengalaman berdasarkan studi.

Sehat merupakan investasi yang mendorong program pembangunan nasional. Untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah mencanangkan program pembangunan nasional Indonesia 2014 yaitu Indonesia Sehat. Program Indonesia sehat mempunyai harapan menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals SDGs 2030 yaitu kepastian kehidupan yang sehat dengan penurunan penyakit tidak menular tercapai. Salah satu program Indonesia sehat adalah mengeluarkan kebijakan nasional pengendalian tembakau. Isi dari kebijakan pengendalian tembakau yaitu usaha promotif dan preventif dengan pemberlakuan kawasan tanpa rokok. Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok harus dilaksanakan oleh semua Pemerintah Daerah di Indonesia.

Penerapan kawasan tanpa rokok di Indonesia masih jauh dari harapan. Sebagai bukti sampai Februari 2015 hanya 30 % (166 kabupaten/kota) yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok, dari 403 kabupaten dan 98 kota di Indonesia (Kemenkes, 2015). Padahal pembentukan peraturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia no.36 tahun 2009

tentang kesehatan pada bagian ketujuh belas pasal 115 telah enam tahun diberlakukan, tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menggambarkan belum meratanya kesadaran Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Pemerintah daerah yang belum menetapkan kawasan tanpa rokok mempunyai banyak kendala. TASC-IAKMI (2009) menjelaskan permasalahan yang sering ditemui dalam pembentukan kawasan tanpa rokok antara lain adalah sumber daya manusia yang lemah dalam mensosialisasi dan mendukung, anggaran daerah kurang dan peran masyarakat yang tidak ada. Kemenkes RI (2011) mendukung penelitian di atas yang menyatakan masih lemahnya penerapan kawasan tanpa rokok dikarenakan kurang optimalnya peran pemimpin daerah, tokoh masyarakat, masyarakat terdidik, advokasi yang kurang dari akademisi serta gencarnya iklan rokok melalui media sosial dan massa. Dukungan semua pihak terhadap penerapan kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah sangat penting mengingat manfaat kebijakan tersebut.

Berbagai riset yang mengungkapkan pentingnya kawasan tanpa rokok terhadap perilaku kebiasaan merokok. Hasil studi efektivitas penerapan kebijakan perda kawasan tanpa rokok oleh Nizwardi Azka (2013) menjelaskan bahwa terjadi kecenderungan penurunan perokok sebanyak 59% di tempat umum. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yai Suryo (2009) menyatakan penerapan kampus bebas rokok dapat mengurangi jumlah mahasiswa merokok secara teratur. Kebijakan ini membatasi gerak perokok aktif sehingga dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif. Hal senada di dukung oleh pusat promosi kesehatan (2011) yang

mejabarkan manfaat penetapan kawasan tanpa rokok antara lain menurunkan angka kesakitan dengan mengubah perilaku masyarakat sehat, meningkatkan produktivitas kerja, kualitas udara yang sehat dan bersih, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Manfaat penerapan kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang RI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan perlu di dukung kebijakan lainnya.

Pelaksanaan Undang-Undang RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan perlu di dukung oleh kebijakan turunan penyertanya. Kebijakan turunannya antara lain Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri no. no. 188/Menkes/PB/I/2011 dan no. 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Tujuannya untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Kebijakan lainnya yang telah dicanangkan adalah Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012 tentang tembakau dengan isi pemerintah daerah untuk segera menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah masing-masing melalui peraturan daerah. Kebijakan tersebut memerlukan rekomendasi dalam penerapan kawasan tanpa asap rokok. Rekomendasi yang diperlukan dalam menunjang penerapan kawasan tanpa rokok antara lain pedoman Kementerian Kesehatan kawasan tanpa rokok, peraturan bersama Kementerian Pertanian, Kesehatan dan Agama tentang pengendalian tembakau, standar monitoring dan evaluasi kawasan tanpa rokok serta peraturan bersama daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penatalaksanaan kawasan tanpa rokok memerlukan aktor dalam merencanakan kebijakan tersebut.

Aktor yang berperan dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok meliputi Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga legislatif, petugas kesehatan, polisi pamong praja, fasilitas layanan umum (rumah sakit, sekolah, tempat bermain, perkantoran, tempat ibadah, angkutan umum), organisasi (profesi kesehatan, LSM), akademik (universitas). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yai suryo (2013) menjelaskan aktor yang berperan adalah kepala daerah sebagai pengambil kebijakan, lembaga legislatif, sosial masyarakat dan pihak akademisi yang memberikan advokasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut perlu. Perencanaan tidak cukup dalam pemberlakuan kawasan tanpa asap rokok, diperlukan pengembangan staf dan pengontrolan di dalamnya.

Pengembangan staf dan pengontrolan dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok melibatkan swadaya masyarakat. TCSC-IAKMI (2009) melibatkan organisasi profesi dan kemasyarakatan untuk membangun dukungan masyarakat umum, menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu perlu adanya kontroling dari lembaga swadaya masyarakat terhadap keberhasilan dalam pengembangan kebijakan tersebut. Solusi yang diperlukan untuk penerapan kawasan tanpa rokok antara lain perencanaan dan implementasi kebijakan secara desentralisasi setiap pemerintah daerah dengan advokasi ke lembaga legislatif. Kolaborasi dengan berbagai sektor terkait untuk membangun dukungan

lingkungan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sebagai upaya penegak hukum. Pemantauan dengan evaluasi yang terus menerus dengan menggandeng pihak akademik dalam perkembangan bukti ilmiah dan pengalaman berdasarkan studi.

B. Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah penerimaan yang dirasakan dari kebersamaan orang-orang disekitar individu. Dukungan sosial ini tidak langsung akan mempunyai manfaat emosional yang akan memberikan sesuatu yang terbaik. Smet (1994) menyatakan bahwa dengan memberi dukungan sosial individu akan mendapat pengalaman yang positif, meningkatkan rasa percaya diri dan mampu untuk mengontrol perubahan-perubahan dilingkungannya. Dukungan sosial merupakan ketersediaan sumber daya yang memberikan kenyamanan fisik dan psikologis yang didapat lewat pengetahuan bahwa individu tersebut dicintai, diperhatikan, dihargai oleh orang lain dan ia juga merupakan anggota dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama (Siswanto,1999).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sarason dalam Kuntjoro (2002) yang berpendapat bahwa dukungan sosial mencakup dua hal, yaitu :

1. Jumlah atau sumber dukungan sosial yang tersedia merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas).
2. Tingkat kepuasan akan dukungan sosial yang diterima berkaitan dengan

persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan kualitas).

Dukungan sosial bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi yang penting adalah bagaimana persepsi si penerima terhadap makna dari bantuan itu. Hal ini erat hubungannya dengan ketepatan dukungan sosial yang diberikan, dalam arti bahwa orang yang menerima sangat merasakan manfaat bantuan bagi dirinya, karena sesuatu yang aktual dan memberikan kepuasan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah sesuatu yang dimiliki individu yang hanya dapat dinilai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada individu tersebut dan memberikan bantuan, dorongan, serta penerimaan apabila individu mengalami kesulitan. Bantuan atau pertolongan tersebut dapat berbentuk fisik, perhatian, emosional, pemberian informasi dan pujian. Itu sebabnya persepsi sangat berperan penting dalam proses seseorang memberikan dukungan (Kuntjoro,2002).

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Dukungan

Menurut Sarason dalam Kuntjoro (2002), adapun faktor-faktor yang memengaruhi seseorang memberikan dukungan antara lain :

a. Keintiman

Dukungan sosial lebih banyak diperoleh dari keintiman daripada aspek-aspek lain dalam interaksi sosial, semakin intim seseorang maka dukungan yang diperoleh akan semakin besar.

b. Persepsi

Dukungan sosial akan dipersepsi positif apabila individu tersebut merasakan manfaat dari dukungan yang diterimanya, dan sebaliknya persepsi yang negatif apabila si penerima tidak merasakan manfaat dari dukungan yang diterimanya.

c. Harga Diri

Individu dengan harga diri yang tinggi memandang bantuan dari oranglain merupakan suatu bentuk penurunan harga diri karena dengan menerima bantuan orang lain diartikan bahwa individu yang bersangkutan tidak mampu lagi dalam berusaha.

d. Keterampilan Sosial

Individu dengan pergaulan yang luas akan memiliki keterampilan sosial yang tinggi, sehingga akan memiliki jaringan sosial yang luas pula. Sedangkan, individu yang memiliki jaringan individu yang kurang luas memiliki keterampilan sosial rendah.

BAB VI

PROSES DAN BENTUK INOVASI

A. Proses Inovasi

Proses terjadinya inovasi dilihat dari bagaimana langkah atau proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga muncul inovasi program tentang kawasan bebas asap rokok di kabupaten Polman. Berdasarkan inovasi gagasan tentang Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui kesepakatan dengan para tokoh masyarakat. Adapun latar belakang munculnya inovasi ini berangkat dari kekhawatiran para tokoh masyarakat dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut dikarenakan terlalu banyak masyarakat yang merokok. Bukan hanya di kalangan orang tua atau orang dewasa saja namun juga anak-anak usiadini 6-12 tahun mulai mengisap rokok.Selain itu rokok

juga sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan agama. Pada awalnya peraturan tentang larangan merokok hanya berlaku di jalanan saja, kemudian setelah ada perubahan selanjutnya masyarakat dilarang merokok di jalanan dan di rumah.

Dengan melihat kondisi yang semakin baik dan masyarakat mulai merasakan dampak dari larangan merokok maka aturan itu tidak lagi berlaku hanya di jalanan dan di rumah saja namun berlaku diseluruh kawasan. Pada tahun 2014, dirumuskannya aturan tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Selanjutnya dipertegas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden di daerah yakni sebagai berikut;

“begini, awalnya itu kita melihat anak-anak disini yang masih kecil sudah merokok, baru 6 tahun sudah mulai merokok, bahkan ada itu yang baru berumur 5 tahun sudah mencoba merokok, kita juga melihat kondisi pendidikan yang sangat rendah, disini banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan mereka. Maka dari itu pak Sumang yang menjabat sebagai kepala desa waktu itu mengumpulkan kita para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk membahas hal itu. Dan akhirnya kita sepakat untuk melarang masyarakat merokok.. (hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2017).

“jadi seperti ini, awalnya kita melihat anak-anak disini yang masih kecil namun sudah jadi perokok, ada yang baru berusia 6 tahun bahkan adapula baru berusia 5 tahun namun sudah merokok. Kitapun melihat nilai pendidikan yang semakin menurun. Maka dari itu Bapak Sumang selaku Kepala Desa pada saat itu menjabat mengumpulkan para tokoh masyarakat untuk membahas program kawasan bebas rokok dan akhirnya kita sepakat akan hal itu”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa inovasi itu muncul dari inisiatif pak idris selaku kepala Desa Bone-Bone. Adanya Kesadaran masyarakat akan bahaya rokok membuat desa yang dulunya

sangat memprihatinkan sekarang telah menjadi desa yang dibanggakan. Program yang diterapkan sejak tahun 2000 telah dinobatkan sebagai desa pertama di Indonesia bahkan didunia yang telah berhasil menerapkan Kawasan Bebas Asap Rokok. Proses terjadinya inovasi program kawasan bebas asap rokok dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Banyaknya anak- anak usia dini yang mulai merokok
2. Dilarang merokok dijalanan
3. Terjadi perubahan perilaku masyarakat
4. Dilarang merokok dijalanan & dirumah
5. Dilarang merokok di seluruh kawasan umum kab. Polman
6. Menciptakan areaSehat bebas dari asap rokok
7. Perdatahun 2014 Tentang kawasan bebas asap rokok

B. Tipe Inovasi

Terdapat 3 (tiga) tipe spektrum inovasi dalam sektor publik menurut Halversen dkk (2003) dalam Sangkala MA (2013:30) yaitu;

a. Incremental innovation to radical innovation

Merupakan perubahan yang sangat mendasar dan secara keseluruhan dari proyek atau proses layanan yang sudah ada. Hal ini tidak terjadi pada inovasi dalam sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

darah merupakan kebijakan baru.

b. Top down innovation to bottom up innovation

Inovasi dalam sektor publik yang ditandai dengan adanya perubahan yang terjadi dari segi sistem dengan artian bahwa terjadi perubahan yang mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen, middle, dan lower manajemen. Hal ini terjadi pada inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Polman.

c. *Need led innovations and efficiency-led innovation*

Perubahan yang terjadi dari inovasi dalam sektor publik ditandai dengan adanya inovasi proses yang terjadi sebelumnya untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien. Hal ini tidak terjadi pada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah karena kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan yang belum ada sebelumnya dan merupakan hal yang baru.

C. Level Inovasi

Level inovasi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan dalam penerapan inovasi program yang diterapkan sesuai dengan kriteria *Best Practice* menurut UN dalam Sangkalan MA (2013:8) yaitu:

a. Dampak (*impact*)

Level inovasi yang dimaksud dalam aspek dampak yaitu sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak positif

terhadap sejumlah pihak. Dari program yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang larangan merokok sangat berdampak baik dikalangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dari segi aspek kesehatan namun juga berdampak pada aspek ekonomi, pendidikan, dan lingkungan juga nampak bersih dan sehat. Dari aspek kesehatan sudah jelas kita ketahui bahwa merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, juga telah tertera pada pembungkus rokok bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sebelum diterapkannya aturan tentang larangan merokok banyak masyarakat yang sakit-sakitan seperti batuk-batuk dan cepat lelah. Apalagi di kabupaten Polman pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani yang butuh kekuatan dalam beraktifitas. Namun sekarang penyakit yang diderita masyarakat kebanyakan penyakit yang bukan ditimbulkan akibat rokok namun karena faktor usia dan pergantian cuaca. Hal ini dinyatakan oleh salah satu warga di kabupaten Polman yaitu;

“Bagus, kan kalau tidak merokok orang itu sehat, dulu bapak dirumah selalu batuk-batuk, sekarang tidak. Dulunya cepat sekali capek kalau pergi kebun. Tapi setelah berhenti merokok sudah tidak”. (wawancara pada tanggal 20 oktober 2017).

Selain dari warga, selanjutnya dipertegas oleh salah satu petugas kesehatan Di POSKESDES, yang dinyatakan sebagai berikut:

“kalau dulu sebelum diterapkan aturan itu saya tidak tau karena saya juga baru beberapa tahun kerja disini, tapi kalau dilihat data dari kesehatan masyarakat yang datang memeriksa kebanyakan itu orang tua dan anak-anak, kalau orang tua itu kebanyakan hipertensi yah penyakit orang tua, kalau anak-anak itu penyakit ISPA dan diare. Itu penyakit yang bukan disebabkan

karena rokok tapi biasanya akibat dari pergantian cuaca seperti sekarang ini..” (hasil wawancara pada tanggal 21 oktober2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa merokok sangat berdampak pada aspek kesehatan manusia. Dengan adanya program yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan masyarakat di wilayah ini. Selanjutnya jika dilihat dari aspek ekonomi dan pendidikan sebelum adanya program tersebut pendapatan perekonomian tergolong rendah, kebutuhan akan hidup masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. Salah satu yang membuat perekonomiannya rendah karena Merokok dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Minimnya pendapatan masyarakat membuat mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka juga karena kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan. Dan setelah aturan tersebut diterapkan maka perekonomian masyarakat sudah mulai membaik karena merokok yang dulunya merupakan sebuah kebutuhan dan membutuhkan biaya sekarang sudah tidak lagi menjadi kebutuhan. Dan lebih mengutamakan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya kelak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salahsatu responden kita yaitu:

“kalau dulu masyarakat banyak yang merokok sedang pendapatan mereka tergolong rendah, pernah, waktu itu ada pihak dari keungan daerah yang datang dan menghitung keuangan dampak merokok, kalau dihitung-hitung harga rokok Rp10.000,- saja/bungkus dan kebanyakan orang merokok 2 bungkus/hari, bila dijumlahkan Rp.20.000/hari satu bulan bisa sampai Rp600.000.- kan lumayan untuk menyekolahkan anak mereka. Dulu masih sangat jarang yang sekolah, walaupun sekolah paling tamat SD, SMP sama SMA. Dan sekarang sudah dilihat dampaknya, anak-anak disini sudah tidak ada yang tidak sekolah, bahkan

sudah banyak yang keluar daerah melanjutkan sekolah diperguruan...”(hasil wawancara pada tanggal 21 oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak merokok dari segi perekonomian dan pendidikan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat karena dengan berhentinya mereka merokok para orangtua sudah mampu menyekolahkan anak mereka sampai ke perguruan tinggi dan tidak jarang dari anak mereka mendapat prestasi disekolahnya. Selain dampak kesehatan, ekonomi dan pendidikan adanya program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa juga sangat berdampak pada lingkungan sekitar, seperti yang dirasakan langsung oleh peneliti saat berada dilokasi penelitian. Lingkungan yang ada terlihat bersih, segar, asri, dan nyaman.

b. Kemitraan (partnership)

Kemitraan bermakna sejauhmana kerjasama dan keterlibatanberbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dikembangkan. Peraturan daerah tentang Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan hasil kesepakatan dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Hal ini dapat dilihat bahwa kemitraan yang terjalin dalam pelaksanaan program sangat baik karena mulai dari perencanaan program sampai pada evaluasi program selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Hasil yang dicapai juga sudah maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pemangku kepentingan dan masyarakat. Lebih lanjut

dipertegas oleh salah satu anggota DPRDKabupaten Polman bahwa:

“mulai dari merencanakan aturan ini kita selalu berkumpul antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk merencanakan, sampai menyepakati aturan ini. Kemudian dalam pelaksanaannya masyarakat juga ikut berpartisipasi meskipun awalnya menolak untuk diadakan aturan larangan merokok. Sampai pada evaluasi kita tidak lakukan dengan ketat karena kita hanya mengharapkan kesadaran dari masyarakat. Paling untuk mengetahui apakah masih ada yang merokok atau tidak, kita Tanya ke anak-anaknya karena kan anak- anak tidak pernah borbohong, kadang kita Tanya merokokkah bapakmu kalau dirumah? Kalau dia bilang iyah kita mencoba mendatangi rumahnya dan melakukan pendekatan secara persuasive dan memberikan pemahaman tentang bahaya merokok. Sekalipun kita sudah tidak pernah lagi menemukan orang yang merokok di wilayah ini bukan berarti di Daerah ini sudah benar-benar jauh dari rokok pasti adalah yang merokok dirumahnya secara sembunyi-sembunyi, namun setidaknya mereka menghargai aturan yang telah ditetapkan tapi saya kira sudah sangat jarang yang merokok walaupun ada ada paling Cuma satu dua orang saja..”(wawancara tanggal 21 oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa terjalin kerjasama yang baik antara semua elemen yang terkait. Mulai dari perumusan program sampai pada proses evaluasi dan bahkan anak-anak sekalipun dilibatkan dalam mengevaluasi program yang telah ditetapkan.

c. Keberlanjutan (sustainability)

Makna keberlanjutan dalam konteks program Kawasan Bebas AsapRokok yakni adanya dukungan dari berbagai elemen terkait. Elemen terkait yang dimaksud adalah dukungan pemerintah daerah, dukungan dari masyarakat, dukungan lingkungan, dan sumber daya manusia. Permasalahan keberlanjutan tergantung bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan inovasi yang telah diciptakan demi mencapai cita-cita

pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari Visi yang mencaji acuan. Adanya Dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan demi mewujudkan desa yang sehat. Selain itu, para pemuda sebagai generasi penerus harus dibina dari sekarang agar budaya yang ada tidak hilang dan aturan ini tetap berlanjut nantinya. Adapun yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan membina anak-anak yang ada di Daerah dengan penguatan lebih kepada etika dan moral dan pemahaman tentang agama. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa:

“demi keberlanjutan program ini kita bina anak-anak tapi lebih kepada etika dan moralnya, misalnya kalau sudah sholat subuh anak-anak tinggal di masjid belajar sampai jam 6. Mereka menghafal al-Qur dan juga diberikan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan. Kalau tiba saatnya bulan Ramadhan selama satu bulan yang naik ceramah itu adalah anak-anak sebagai bentuk pembelajaran bagi mereka..”(wawancara tanggal 21 oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan dari program ini, selain dijadikan visi misi pemerintah desa juga salah satu cara untuk melanjutkan program ini adalah dengan membina anak-anak sebagai generasi penerus nantinya. Perhatian dari pemerintah daerah sudah ada setelah program peraturan daerah yang akan di terapkan diterapkan. Terbukti dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana daerah seperti pembangunan PUSKESDES, dan perbaikan jalan di berbagai daerah Polman.

d. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership and community empowerment*)

Kepemimpinan dalam program Kawasan Bebas Asap Rokok bermakna

kemampuan para pengambil kebijakan dalam mengarahkan dan mengelola sumber daya, elemen pendukung, serta instrument yang dimiliki untuk mencapai tujuan program yang dicanangkan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebijakan publik yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam aspek kepemimpinan ternyata pimpinan daerah sangat demokratis dalam pengambilan kebijakan. Terbukti dengan dipanggilnya beberapa elemen terkait untuk diajak berdiskusi dalam perencanaan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“kepala desa yang menjabat kali ini cukup inovatif, karena sebelum ia memutuskan sebuah kebijakan dengan kumpulan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perumusannya untuk membuat aturan di wilayah polman..”(wawancara pada tanggal 21 oktober 2017)

Hal yang disampaikan diatas dapat menunjukkan bahwa pimpinan daerah telah berusaha untuk melibatkan secara keseluruhan elemen terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam program Kawasan Bebas Asap Rokok Di kabupaten Polman, masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan dalam pelaksanaannya masyarakat yang menjadi pelaku utama dalam hal pelaksanaan program tersebut demi menciptakan Desa yang Sehat bebas dari asap rokok. Selain pemerintah desa masyarakat juga ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Saling membantu demi kemajuan daerahnya.

Inovasi tambahan bahwa akan adanya ketegasan dari pemerintah daerah dalam hal pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut sehingga sampai saat ini tidak ada masyarakat yang berani merokok di wilayah tersebut, baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang. Selain itu adanya kesungguhan dari pemerintah daerah sehingga aturan ini dapat diterima baik oleh masyarakat seiring berjalannya waktu. Yang dulunya banyak masyarakat yang menolak namun dengan kegigihan dalam memberikan pemahaman maka masyarakat pada akhirnya sadar akan bahaya merokok. Dan sampai sekarang sudah merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya gagasan PERDA TAHUN 2014.

e. Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial

Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial dapat diartikan sebagai kesetaraan masyarakat yang merujuk pada pemahaman adanya kesamaan kedudukan dan perlakuan yang dialami oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan program peraturan desa tentang Kawasan bebas asap rokok kesetaraan gender dan pengecualian sosial dapat dilihat dari segi pemberian sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Seperti sanksi yang diberikan kepada warga yang melanggar antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam pelaksanaan ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan. Lebih lanjut dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yaitu:

“mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar tidak ada yang dikecualikan, semua sanksi yang diberikan sama sesuai dengan sanksi yang telah disepati yaitu berupa sanksi sosial. Sampai hari ini belum pernah kami melihat perempuan merokok di daerah ini, bahkan kalau ada yang merokok mungkin itu hal yang aneh menurut kami. .”(wawancara pada tanggal 21 oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut tidak terjadi kesetaraan gender dalam pelaksanaan program tersebut.

Sedangkan Perbedaan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan telah disepakati dalam undang-undang daerah.

f. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer

Konteks lokal merujuk kepada aspek-aspek kebutuhan masyarakat daerah, sumberdaya internal yang dimiliki, aspek kebudayaan setempat, serta aspek program yang pernah dikenal sebelumnya. Karena dalam perumusan kebijakan ini masyarakat ikut berpartisipasi, secara otomatis dapat dikatakan bahwa program ini lahir memang karena kebutuhan masyarakat akan sebuah program yang dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik demi memajukan daerahnya.

Dalam pelaksanaan program tersebut yang paling penting adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan pentingnya akan pendidikan untuk membangun daerah lebih maju. Sehingga aspek

kemungkinan untuk ditransfer bermakna bahwa program inovasi yang berhasil dilaksanakan bisa ditiru oleh daerah lainnya. Sampai saat ini sudah banyak yang meniru kebijakan ini. Seperti yang dipaparkan oleh kepala desa dari hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

“sekarang sudah banyak yang menerapkan juga aturan tentang larangan merokok seperti yang terjadi di desa sebelah. sebagian besar warganya sudah meninggalkan rokok..”(hasil wawancara tanggal 22 oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa program ini bisa diterapkan di daerah lain. Karena yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat akan bahaya rokok dan lingkungan yang sehat bebas dari penyakit.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses terjadinya inovasi

Menurut Green, Howells & Miles (Thenint, 2010:4) mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa program kawasan bebas asap rokok yang akan berlaku di daerah polman merupakan sebuah inovasi karena program yang dicanangkan merupakan bentuk layanan baru bagi masyarakat yang belum pernah ada sebelumnya. Adapun latar belakang terjadinya inovasi ini berawal dari inisiatif daerah. Dalam perumusannya pengambil kebijakan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh

masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Program yang digagas sejak tahun 2014 telah membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Dampak yang paling dirasakan adalah dari segi kesehatan. Selain itu juga berdampak pada perekonomian karena biaya yang dikeluarkan untuk merokok sekarang dibelanjakan untuk hal yang bermanfaat bagi keluarga. Kemudian dampak dari program ini juga sangat berdampak pada tingkat pendidikan di desa bone-bone, dimana yang dulunya anak-anak banyak yang tidak sekolah dan putus sekolah, sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Dilihat dari segi lingkungan sesuai dengan pengamatan peneliti selama berada di lokasi memang tidak terlihat satupun orang yang merokok, kebersihan di desa itu juga sangat dijaga dan lingkungan juga terlihat bersih dan sehat. Udara yang dihirup sangat terasa segar dengan rimbunnya pepohonan yang ada di wilayah tersebut. Tidak adanya masyarakat yang terlihat merokok di wilayah tersebut membuat program ini dikatakan telah berhasil.

Selain itu dampak yang dirasakan bagi masyarakat setelah program ini berjalan bertahun-tahun berdampak bagi kehidupan masyarakat semakin baik dari sebelumnya. sebagaimana yang dikatakan Albury dan Mulgan dalam Thenint (2010:4) bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

2. Tipe Inovasi

Tipe inovasi menurut Halversen dkk ada tiga yaitu; (a) *Incrementalinnovation to radical*, (b) *Top down innovation to bottom-up innovation*, (c) *Need led innovations and efficiency-led innovation*. Dalam program kawasan bebas asap rokok sesuai dengan hasil penelitian bahwa tipe inovasi program ini termasuk dalam tipe *Top down innovation to bottom-up innovation* dikarenakan inovasi itu terjadi karena inisiatif dari kepala desa selaku pemimpin di desa tersebut, selanjutnya ke tokoh masyarakat kemudian ke seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Program ini juga merupakan program baru yang belum pernah ada sebelumnya.

3. Level inovasi di Kabupaten Polman

a. Dampak

Indikator dampak dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut memberikan hasil positif terhadap masyarakat. Program yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah merupakan sebuah program baru yang sangat inspiratif karena program yang belum pernah ada sebelumnya dan dianggap sebagai Desa pertama didunia yang berhasil menerapkan aturan tentang Kawasan bebas asap rokok yang melarang masyarakat merokok di wilayah kabupaten Polman dan aturan itu berlaku seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan bagi siapa saja yang berkunjung ke daerah Polman. Dampak yang ditimbulkan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan merupakan hal yang positif karena

dengan adanya program tersebut masyarakat dapat merasakan keindahan desa tanpa asap rokok. tingkat perekonomian yang semakin membaik. Dan Pendidikan tinggi juga sudah dirasakan masyarakat. Pendidikan yang dulunya sangat memprihatinkan, sekarang sudah mulai bersaing dengan pelajar dari luar daerah bahkan sampai keluar pulau demi mengenyam pendidikan.

b. Kemitraan

Kemitraan bermakna sejauh mana kerjasama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang dikembangkan. Program yang akan diterapkan di daerah polman melibatkan berbagai unsur yaitu pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda mulai dari perencanaan program, pelaksanaan sampai pada evaluasi program. Bahkan dalam mempertahankan keberhasilan dari program tersebut masih tetap melibatkan masyarakat. Meskipun terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat namun dalam pelaksanaan program ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Nanti setelah program ini berhasil dan membawa dampak yang sangat baik pada masyarakat barulah ada dukungan dari pemerintah.

c. Keberlanjutan

Dalam buku *innovative governance* oleh Sangkala MA, menyatakan bahwa keberlanjutan dapat dilihat dari dukungan berbagai

elemen terkait. Pada program ini dukungan jelas dilihat baik dari eksekutif, legislative dan masyarakat Kabupaten Polman. terbukti dengan keterlibatan berbagai elemen dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Aturan itu juga telah menjadi Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di kabupaten Polman. Selain itu demi keberlanjutan program ini masuk dalam Visi dan Misi daerah. Sampai saat ini dukungan dari masyarakat masih kuat, pemerintah daerah juga sudah mendukung adanya program ini bahkan berharap bisa juga diterapkan di desa lain. Selain pemerintah daerah juga sangat didukung dari dinas Kesehatan. Banyaknya dukungan dari berbagai kepentingan membuat peraturan ini akan tetap berlanjut.

d. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat (*leadership and community empowerment*)

Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat menurut UN dalam Sangkala MA (2013:9) bahwa kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan para pengambil kebijakan dalam mengarahkan dan mengawasi sumberdaya, elemen pendukung, serta instrument yang dimilikinya untuk mencapai tujuan program yang dicanamkan serta tidak terlepas dari aspek teknik yang digunakan dalam pengorganisasian dan realisasi tindakannya. Serta sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses penerapan program yang dicanamkan. Program kawasan bebas asap rokok merupakan inisiatif sendiri dari pemerintah daerah yang kemudian mendapat apresiasi dari masyarakat

sekaligus sebagai pengambil kebijakan. Namun dalam hal perumusan program ini pengambil kebijakan dalam hal ini kepala desa melibatkan berbagai elemen pendukung seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. Keterlibatan berbagai unsur bukan hanya dalam perumusan saja namun sampai pada evaluasi program yang telah di terapkan.

Demi mencapai tujuan dari program ini, ketegasan kepala desa dapat dilihat dari pemberian sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh aparat ketika mengetahui ada masyarakat yang merokok di wilayah Polman maka melakukan pendekatan persuasif untuk memberikan pemahaman dan memberikan sanksi seperti yang telah ditetapkan. Ketika yang melanggar adalah warga pendatang, maka diberikan pemahaman dan dipersilahkan untuk meninggalkan desa tersebut sesuai yang telah ditetapkan dalam PERDA.

e. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial

Kesetaraan gender dan pengecualian sosial menurut UN dalam Sangkala MA (2013:9) merupakan inisiatif yang yang dapat diterima dan merupakan respon dari masyarakat terhadap perbedaan sosial dan budaya. Dalam konteks inovasi program kesetaraan masyarakat merujuk kepada pemahaman adanya kesamaan kedudukan dan perlakuan secara hokum yang dialami oleh masyarakat. Dalam program kawasan bebas asap rokok di kabupaten Polman dapat dilihat adanya kesamaan kedudukan masyarakat karena program yang dicanangkan adalah untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan bagi siapa saja yang berkunjung ke

polman. Tidak ada perbedaan kedudukan dalam pemberian sanksi karena semua telah diatur dalam PERDA tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Jika dilihat dari perbedaan pemberian sanksi antara laki-laki dan perempuan dalam program ini tidak terlihat perbedaannya karena tidak ada perempuan yang merokok di wilayah tersebut. Walaupun ada pendatang wanita yang merokok maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditetapkan.

f. Inovasi dalam Konteks Lokal dan Dapat Ditransfer (*innovation within local content and transfer ability*)

Inovasi dalam konteks lokal sesuai dengan buku *innovative governance* karya Sangkala MA, harus memenuhi beberapa indikator antara lain, yaitu kebutuhan masyarakat, sumber daya lokal, sosial budaya, serta sejarah lokal. Kebutuhan masyarakat akan program ini sangat jelas terlihat dikarenakan dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat sangat terasa apalagi mengenai kesehatan mereka. Selain itu juga sangat berdampak pada pendidikan di daerah tersebut. Adapun lahirnya program ini dari inisiatif kepala desa yang kemudian dalam perumusannya melibatkan masyarakat sehingga program ini lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan hidup sehat. Dilihat dari kondisi sosial budaya dan sejarah lokal sangat terlihat dalam program ini karena program ini lahir dari inisiatif aparat daerah. Sedangkan untuk kemungkinan ditransfer sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyak daerah yang telah menerapkan aturan ini meski belum berhasil seperti yang terjadi di desa bone-bone. Juga dikarenakan

kebutuhan masyarakat akan hidup sehat dan sejahtera. Desa tetangga juga mulai menerapkan aturan ini meski belum maksimal seperti yang ada di Desa Bone-bone. Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu proses terjadinya inovasi, tipe inovasi dan level inovasi dalam Program Kawasan Bebas Asap Rokok Di kabupaten Polman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Proses terjadinya inovasi

Inovasi program kawasan bebas asap rokok di kabupaten Polman merupakan hal yang sangat menginspirasi daerah lain diseluruh dunia. Desa Bone-Bone yang dinobatkan sebagai Desa pertama di dunia yang berhasil menerapkan kawasan bebas asap rokok pun menjadi salahsatu inspirasi dalam inovasi di daerah ini, berawal dari inisiatif para aparaturn daerah yang mulai merokok pada masa dimana mereka harusnya menuntut ilmu dengan baik di bangku sekolah dasar. Dengan adanya rasa prihatin dengan kampungnya kelak maka di buatlah inovasi gagasan peraturan daerah tahun 2014 tentang kawasan bebas asap rokok. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. aturan ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat di daerah Polman, namun juga berlaku bagi siapa saja yang berkunjung daerah tersebut.

2. Tipe Inovasi

Tipe inovasi dalam program kawasan bebas asap rokok di kabupaten Polman yaitu *top down innovation to bottom-up innovation*

karena program ini merupakan program baru dan dimulai dari basis pemerintah desa selaku pemimpin di desa selanjutnya ke tokoh-tokoh masyarakat barulah sampai kepada masyarakat dan daerah.

3. Level Inovasi

a. Dampak

Dampak yang terjadi di desa bone-bone setelah diterapkannya aturan tentang bebas asap rokok sangat membawa dampak yang positif dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, dan juga berdampak demi kemajuan daerah yang semakin membaik.

b. Keberlanjutan

Keberlanjutan program tentang Kawasan bebas asap rokok di daerah besar kemungkinan akan berlanjut terbukti dengan adanya visi misi daerah periode 2014-2019 yaitu dengan menjadikan daerah Polman menjadi daerah sehat. Dengan melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat maka program ini akan dipertahankan. Pemerintah desa juga melakukan berbagai macam cara untuk mendidik para generasi muda dalam hal etika dan moral dalam menghadapi kehidupan yang semakin modern.

c. Kemitraan

Dalam hal kemitraan peraturan tentang kawasan bebas asap rokok kDaerah Polman pemerintah daerah tidak bermitra

dengan siapapun diluar dari wilayah kabupaten dan provinsi., ataupun dengan dinas kesehatan. Kemitraan ada hanyalah dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidik, dan tokoh pemuda. Mulai dari perumusan program hingga pada proses evaluasi dan sampai pada keberlanjutan program.

d. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat

Kepemimpinan dalam penerapan program kawasan bebas asap rokok di daerah terlihat kesungguhan pemimpinnya karena hingga saat ini program tersebut masih di rintis dan di bgagas dan ketegasan pengambil kebijakan dalam pemberian sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

e. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial

Dalam program kawasan bebas asap rokok di daerah Polmantidakterlihat kesetaraan gender dalam hal pemberian sanksi kepada yang melanggar bagi perempuan dan laki-laki, karena sampai saat ini belum pernah ada perempuan yang dilihat ataupun kedapatan merokok di wilayah tersebut. Adapun yang melanggar aturan tersebut tetap diberikan sanksi sesuai dengan sanksi yang telah disepakati.

f. Inovasi dalam konteks local dan dapat ditransfer

Inovasi program kawasan bebas asap rokok merupakan hal yang sangat positif dan sangat menginspirasi bagi daerah-daerah

lain di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Inovasi ini sudah mulai diterapkan di desa-desa lain seperti desa kendenan dan desa bonebone.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang saya lakukan mengenai inovasi gagasan PERDA kabupaten Polewali Mandar tentang kawasan bebas rokok, maka adapun kesimpulan yang dapat saya tuliskan dala laporan hasil penelitian saya sebagai berikut;

1. inovasi gagasan perda kabupaten polewali mandar tentang kawasan bebas asap rook yang mulai di perdakan pada tahun 2914 hingga saat ini masih dalam proses pemantapan baik itu dalam tinjauan kembali perda tersebut maupun dalam bentuk penerapan sebagai tindak-lanjut dari sistem ini.

2. inovasi gagasan ini sangat mendapat apresiasi dari pemerintah dan masyarakat
3. inovasi gagasan ini menggunakan sistem level inovasi yang akan di berlakukan di daerah.
4. inovasi gagasan perda ini akan di tinjau kembali sebagaimana kebutuhan yang semestinya guna penerapan yang lebih efektif dan efisien.
5. program inovasi ini akan terusdi kembangkan, dan mendapat pengawasan dari berbagai pihak pemerintah dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-saran terkait penerapan program Kawasan Bebas Asap Rokok Di kabupaten Polman sebagai berikut:

1. Karena kabupaten Polman tergolong daerah yang unik dengan adanya berbagai macam aturan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, maka itu harus tetap dilestarikan dan dibudayakan. Pemerintah daerah harus tetap mengawal para generasi muda dalam menghadapi dunia yang semakin modern.
2. Adanya hubungan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, harusnya ada kerjasama dengan dinas kesehatan agar kekurangan seperti yang terjadi di POSKESDES bisa lebih dimaksimalkan.

3. Karena kabupaten Polman telah dikenal di beberapa penjuru dunia dengan program yang sangat baik, maka sudah sepantasnya pemerintah Daerah membangun daerahnya menjadi lebih baik seperti perbaikan jalan yang masih belum layak untuk dilewati menuju kabupaten yang berkemajuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Ancok, Djameludin.2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi* :Jakarta: Erlangga

Al-arasy, Wahyuddin.2014. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok* (Studi tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan). Skripsi pada Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak diterbitkan.

Byrd, J & Brown, P.L. 2003. *The Innovation Equation. Building Creativity and Risk*

De Jong, J & Hartog, D D. 2003. *Leadership as a determinant of innovative behaviour. A*

Conceptual framework. <http://www.eim.net/pdf-ez/H200303.pdf>. 21 April 2006

- Ellitan, Lena dan Anatan, Lina.2009. *Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung: Alfabeta
- Davenport,Thomas H.1996. *Inovasi Proses Rekayasa Ulang Pekerjaan Melalui teknologi Informasi*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Drucker,Peter F.1996. *Inovasi dan Kewiraswastaan praktek dan dasar-dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fontana, Avanti. 2011. *Innovative We Can (manajemen inovasi dan penciptaan nilai individu, organisasi, masyarakat)*. Jakarta:Cipta Inovasi Sejahtera
- Fontana, Avanti.2011. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Cipta Inovasi Sejahtera.
- Hastuti, Sri Endah.2015. *Inovasi Sanitary Landfill dalam Penanganan Sampah pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar*. Skripsi pada Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Makmur, & Thahir,Rohana.2012. *Inovasi &Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Maleong, Lexy J.2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Mustafa,Andi Azhar.2015. *Efektifitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar*. Skripsi pada Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Pasolong, Harbani, 2013. *Metode Penelitian administrasi publik*. Bandung: Alfabeta

Rahayu, Amy Y.S. 2015. Manajemen Perubahan dan Inovasi. Jakarta :UI-Press

Renianti. 2012. *Kreatifitas Organisasi dan Inovasi Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sangkala, 2013, *Innovative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Capiya Publishing

Siagian, Sondang P. 2002. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi & Safruddin. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan* Pedoman Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.

Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta. STIA-LAN Press

Suyono, Evan. 2015. *Inovasi Kebijakan Pendidikan di Kota Palopo*. Skripsi pada Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Hasanuddin Makassar.

Thenint, Hugo LL & A. 2010. *Mini Study 10 Innovation in The Public Sector*. Manchester. Global Review of Inovation Inteligence and Policy Studies. Inno Gripe

Taking in Your Organization. San Fransisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. A Wiley Imprint

Agustini, Permata Sari Maria. 2014. *Inovasi Pelayanan di Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Borneo administrator volume 10, nomor 2 halaman 135-252, 2014

Artikel :

Generasi muda sehat, Negara Kuat. Direktorat pengelolaan Media Publik, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Edisi 16 ,September 2013.

Website:

Data Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas), Suervei kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Dalam :<http://www.depkes.go.id/article/view/15060900001/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara.html> Diakses 31 Oktober 2015, pukul 20:17 PM

Jumlah perokok di Indonesia sesuai dengan data dari Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), 2015 Dalam:<http://nasional.sindonews.com/read/744854/15/61-4-juta-penduduk-indonesia-perokok-aktif-1370000557> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, pukul 20:17 PM.

Kabupaten yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok. Dalam [http://health.detik.com/read/2011/01/24/174759/1553470/763/22-kota-dan](http://health.detik.com/read/2011/01/24/174759/1553470/763/22-kota-dan-kabupaten-sudah-terapkan-kawasan-tanpa-rokok) kabupaten-sudah-terapkan-kawasan-tanpa-rokok. Diakses pada tanggal 15 Desember 2015, pukul 18:35 PM. Pentingnya kesehatan tanpa rokok Dalam: http://www.kompasiana.com/nersundip/pentingnya-kawasan-tanpa-rokok_5578429dc3afbd387f27e6a2 Diakses pada tanggal 04 November 2015, pukul 12:42 PM.

Byrd, J & Brown, P.L. 2003. The Innovation Equation. Building Creativity and Risk

Taking in Your Organization. San Fransisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. A Wiley Imprint

De Jong, J & Hartog, D D. 2003. Leadership as a determinant of innovative behaviour. A

Conceptual framework. <http://www.eim.net/pdf-ez/H200303.pdf>. 21 April 2006

<http://studymicrofinance.blogspot.com/2008/11/optimalisasi-customer-based-di-bri-yang.html>008

<http://www.kompas.com>

<http://www.infoskripsi.com/Free-Resource/Konsep-Perilaku-Pengertian-Perilaku-Bentuk-Perilaku-dan-Domain-Perilaku.html>

MOTTO

Hidup adalah tentang pencapaian, hidup bersama adalah hal terindah yang ada dalam dunia ini. Menjalin hubungan baik antar sesama dan kepada sang ilahi.

Daftar Informan

1. Nama: Husni Mubarak (masyarakat/anggota forum pemuda)
Status: Andalan daerah
Umur: 30 Tahun
2. Nama: Aco Aswad (masyarakat/forum pemuda)
Status: Pendidik
Umur: 23 Tahun
3. Nama: Vita (pelajar)
Status: Pelajar SMA
Umur: 16 Tahun
4. Nama: Ismail (Kepala Rumah Tangga)
Status: Wiraswasta

- Umur: 37 Tahun
5. Nama: Dito (masyarakat/pemuda)
- Status: Pengusaha
- Umur: 22 Tahun
6. Nama: Gusti (pelajar)
- Status: Pelajar SMA
- Umur: 16 Tahun
7. Nama: Rahmadi Anwar (anggota DPRD)
- Status: Anggota Dewan Daerah
- Umur: 47 Tahun

Topik wawancara : Bagaimana Dukungan Masyarakat Tentang Inovasi Gagasan Perda ini?

Narasumber : Aco Aswad (masyarakat)

Pewawancara : Gunawan

Rilis Wawancara :

1. Apakah anda seorang perokok?
2. Bagaimana pendapat anda terhadap inovasi gagasan perda kawasan bebas rokok?
3. Apakah anda mendukung inovasi gagasan ini?
4. Bagaiman keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi ini?

5. Apakah pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses inovasi ini?
6. Bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat tentang inovasi ini?
7. Apakah anda pernah mendengar keluhan dari masyarakat atas inovasi ini?
8. Apa alasan utama pihak pemerintah menggagas inovasi daerah ini?
9. Bagaimana tanggapan dari masyarakat yang kontra?
10. Apakah terdapat implikasi sosial dari munculnya inovasi gagasan perda kawasan bebas rokok?
11. Jika ada, seperti apa implikasi tersebut?
12. Bagaimana Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok?
13. Apa tanggapan mereka yang pro terhadap program ini?

Trianggulasi Data

Rumusan Masalah	Wawancara	Dokumentasi	Observasi	Partisipatif	Interpretasi
1. Bagaimana Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Tentang	Masyarakat sangat mengapresiasi program pemerintah ini, sebab program ini tentu akan berefek positif bagi kehidupan masyarakatat kedepannya. Selain akan menjadi salah satu alasan	\	Dari hasil pengamatan yang saya lakukan di lapangan, belum ada penerapan yang signifikan mengenai sistem ini, terutama bagi sanksi yang melakukan pelanggaran, hal ini di sebabkan belum adanya keseriusan dari penerapannya		Dari hasil observasi saya, dapat saya simpulkan bahwa penerapan sistem ini belum benar-benar signifikan dan tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah.

Kawasan Bebas Asap Rokok ?	perokok dapat menghargai mereka yang tidak suka atau terganggu dengan asap rokok, tentu ini ini akan menjadi faktor dan alasan bagi mereka untuk berhenti merokok.		itu sendiri.		
2. Bagaimana Inovasi PerdaK abupaten Polman ?	Inovasi ini muncul atas inisiatif dari pemerintah kota dan daerah di iringi dengan adanya keselarasan antara inisiatif pemerintah dan harapan masyarakat. Inovasi ini tergolong dalam teori level inovasi. Melalui proses pengamatan dan tanggapan dari berbagai pihak yang ada di masyarakat.		Dalam proses observasi yang peneliti lakukan, saya tidak menemui adanya [proses sosialisasi di sebabkan inovasi ini merukan inovasi dan perda tahun 2014. Namun, apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat mengenai inovasi perda ini masih di tanggapi serius oleh masyarakat terutama pemerintah itu sendiri.		bilamana pemerintah benar-benar ingin serius dalam menerapkan tetapi masyarakat sangat mengapresiasi inovasi program ini Pemerintah harus benar-benar melakukan sosialisasi terlebih dahulu secara intensif. Serta perlu adanya kerjasama yang serius oleh masyarakat dan pihak pemerintah daerah dan kota.
3. Bagaimana Proses	Inovasi gagasan perda ini		Pemerintah daerah dan kota menggagas		Inovasi gagasan perda tahun

<p>Terben- tuknya Inovasi Gagasa n Terseb- ut?</p>	<p>merupakan bentuk level inovasi yang pada intinya tidak lepas dari apa yang menjadi tujuan dari perda ini sendiri. Di mulai dari kesepakatan internal pemerintah daerah dan kota, sosialisasi, serta, tanggapan dari segenap elemen masyarakat.</p>		<p>inovasi ini secara seksama dan penuh transparansi, sehingga masyarakat pada dasarnya memahami apa yang menjadi tujuan serta bentuk dan arah inovasi perda ini, meski kemudian tidak berjalan intensif namu hal ini tetaplah sebuah peraturan yang telah di perdakan.</p>		<p>2914 merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang kawasan bebas rokok. Sesuai dengan tujuannya, perda ini tentunya sebuah aturan yang haruslah direalisasik an meski dewasa ini belum ada penerapan yang terlihat serius dari masyarakat itu sendiri. Pada kesimpulan nya perda ini tentu harus di evaluasi kembali.</p>

Trianggulasi Waktu

Daftar pertanyaan	SM	A	MD	Interpretasi
1. Bagaimana pendapat anda terhadap inovasi gagasan perda kawasan bebas rokok?	Inovasi perda ini tentu akan membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat.	Masyarakat sangat perlu peraturan yang seperti ini. Sebab banyak hal yang ingin di rubah dalam daerah ini.	Saya sangat mengapresiasi program daerah ini. Walaupun belum ada yang betul-betul mampu dilihat realisasinya.	
2. Apakah anda mendukung inovasi gagasan ini?	Secara pribadi saya tidak mendukung ataupun	Tentu saja, walau saya seorang perokok namun saya	Awalnya saya mendukung program ini, namun pada akhirnya saya	

	menolak apa yang menjadi kebijakan daerah,.	selalu berfikir positif	kecewa dengan pemerintah maupun masyarakat sebab tidak ada realisasinya	
3. Bagaimana Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok?	Masyarakat dalam hal ini sangat mendukung, buktinya bahwa adanya tanggapan positif dari masyarakat dan keseriusan untuk benar-benar bekerja sama dengan pemerintah atas perda ini.	Kami selaku masyarakat mendukung secara moril apa yang menjadi kebijakan pemerintah selama itu baik	Saya siap menjadi salah satu peserta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bilamana pemerintah membutuhkan saya.	
4. Apa alasan utama pihak pemerintah menggagas inovasi daerah ini?	Mungkin pemerintah ingin masyarakat kita jauh lebih bisa menerapkan pola hidup sehat	Pemerintah tentunya ingin bilamana masyarakatnya mampu lebih maju	Saya yakin, dengan penerapan sistem ini, pemerintah mengharapkan masyarakat mampu lebih produktif dan sehat	
5. Bagaimana Inovasi Perda Kabupaten Polman?	Inovasi perda ini bertujuan untuk memenuhi	Bermula dari Kesepakatan pemerintah itu sendiri	Tentunya ada sebab, bentuk dan tujuannya pak, tapi saya	

	harapan masyarakat dan juga pemerintah, inovasi ini berlaku bagi semua.	tenrunya.	kurang mampu memahaminya .	
6.seperti apa sosialisasi pemerintah tentang perda ini?	Sosialisasinya tidak menyeluruh, saya pun terlambat mendengar ini.	Saya dulu pernah mendenagar ini, tapi saya menganggap itu hanya sebuah berita saja.	Pemerintah memang tidak pernah melakukan sosialisasi secara intensif dan efektif.	

Data Observasi dan Dokumentasi

Rumusan Masalah	Hasil Penelitian (Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi)	Interpretasi	Kaitan Dengan Teori
1. Bagaimana Dukungan Masyarakat Terhadap Inovasi Gagasan Perda Kabupaten Polman Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok?	<p>• Wawancara</p> <p>Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan inovasi gagasan perda ini, masyarakat sepenuhnya mendukung secara mori apa yang menjadi kebijakan daerah dan pemerintah kota, meski dari beberapa kalangan ada pula yang secara keras menolak kebijakan ini. Namun pada kesimpulannya apa yang menjadi harapan pemerintah mengenai program ini merujuk pada level inovasi itu sendiri,</p>	Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan dari apa yang di dapatkan oleh peneliti ialah, program ini belum berjalan sebagai mana mestinya, sebab berbagai macam	Level innovation dan al-arasi tentang penerapan kebijakn dalam suatu wilayah. ellitan Lena dan Anatan bahwa dalam sebuah inovasi diperlukan sebuah manajemen

<p>2. Bagaimana Inovasi Perda Kabupaten Polman?</p> <p>3. Bagaimana Proses Terbentuknya Inovasi Gagasan Tersebut?</p>	<p>masyarakat tentunya menginginkan hal baik di dalamnya.</p> <p>• Observasi Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam berkaitan dengan apa yang menjadikan gagasan perda ialah adanya respon positif dari masyarakat atas apa yang akan menjadi peraturan atau kebijakan daerah .</p> <p>Inovasi perda ini memiliki alasan, apa yang menjadi harapan pemerintah, tujuan serta terdapat bentuk-bentuk inovasi di dalamnya.</p> <p>Tentu melalui proses pengamatan terlebih dahulu, baik itu dari internal masyarakat maupun dalam pemerintah itu sendiri.</p>	<p>alasan, terutama tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan segenap elemen yang terkait di dalamnya.</p> <p>Inovasi ini berkaitan dengan bentuk, proses, serta manfaat dari apa yang menjadi inovasi ini. Melalui proses pengamatan dan harapan masyarakat, tujuan, serta bentuk dan manfaat</p>	<p>yang baik. Penciptaan nilai individu yang baik oleh Fontana. Drucker dan Peter tentang dasar-dasar inovasi. Reniarti tahun 2001 mengenai perlunya kreatifitas dalam sebuah inovasi yaitu tentang kreatifitas inovasi. Sangkala pada tahun 2013 inovasi of government serta konsep dan aplikasi.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------